

Berislam dan Bernegara bagi Muslim Patani: Perspektif Politik Profetik

Mr. Niaripen Wayeekao

IKA-Siyasah Yogyakarta. Email: Niaripen.14@gmail.com

Abstrak: Negara Thailand merupakan Negara yang berbentuk kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Budha dan hanya sedikit yang beragama Islam. Masyarakat muslim Thailand terkonsentrasi di wilayah Thailand selatan di antaranya Patani, Narathiwat dan Yala, Muslim melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara sosio-kultural dibandingkan dengan penduduk mayoritas Negara Thailand yaitu Budha. Sejarah Perkembangan politik Thailand selatan tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan, Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu rasialisme. Implikasi dari masalah ini ketidakadilan terhadap minoritas yang berada di Thailand. Sampai saat ini kebijakan pemerintah terhadap minoritas masih berlangsung dan belum menemukan titik temu perdamaian. Dari kompleksitas politik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ; pertama, bagaimanakah Perkembangan Politik di Thailand Selatan, dan kedua, Bagaimanakah kebijakan pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim warga Patani. Penelitian ini menemukan bahwa perkebangannya politik Thailand Selatan Tahun 1930-1950, tahun 1950-1980an, tahun 1990-terakhir. Dari kompleksitas perkembangan politik tersebut, pemerintah Thailand melakukan kebijakan terhadap umat Islam dan Perkembangan Kotemporer Muslim Patani

Kata Kunci: *Thailand Selatan, Politik, Muslim Patani*

Pendahuluan

Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan China, daratan India sampai laut China. Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha, sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah China. Seperti halnya kaum minoritas di negara-negara yang lain, kawasan Thailand bagian selatan yang

merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim adalah daerah konflik agama. Selain itu terjadi persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan.

Negara Thailand terdiri dari 77 provinsi dengan jumlah penduduk 67 juta jiwa. Patani menjadi salah satu dari lima wilayah di Thailand selatan selain, Yala, Narathiwat, Satun (Setul) dan Songkhla, Mayoritas dihuni oleh umat Islam. Jumlah penduduk Muslim di Thailand sekitar 15 persen dibandingkan penganut Budha yang 80 persen. Mayoritas muslim tinggal di Selatan Thailand sekitar 1,673,900 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk khususnya di provinsi Patani, Yala, Naruthiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand selatan.¹

Negeri Patani mempunyai sejarah yang cukup lama, jauh lebih lama dari negeri-negeri di semenanjung Melayu seperti Malaka, Johor dan Selangor . Sejarah lama Patani merujuk kepada kerajaan Melayu Tua pengaruh Hindu-India bernama Langkasuka.

Kawasan timur Langkasuka meliputi daerah pantai timur semenanjung, mulai dari Senggora, Patani, Kelantan sampai Terengganu, termasuk juga kawasan utara negeri Kedah. Menurut catatan sejarah, Langkasuka itu terletak di daerah Patani sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ahli antropologi di Prince of Songkla University, yang dikuatkan juga oleh sejarawan lain seperti Prof. Zainal Abidin Wahid, Mubin Shepard, Prof. Hall dan Prof. Wheatly. Tapi, persoalan berubahnya nama Langkasuka menjadi Patani masih belum diketahui dengan pasti karena tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai hal itu. Mengikut hikayat Patani pula, kerajaan Patani berasal dari kerajaan Melayu yang berpusat di pedalaman dan sukar untuk didatangi oleh pedagang-pedagang. Sehingga raja Patani ketika itu memindahkan pusat kerajaanya ke sebuah perkampungan nelayan yang akhirnya di beri nama "Patani".

Karena letaknya yang strategis dari segi geografis, Patani

¹ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 231.

menjadi tumpuan para pedagang dari timur maupun barat, untuk singgah di sana sambil beristirahat ataupun berdagang. Sehingga Patani menjadi pusat perdagangan ketika itu.

Menurut ahli Antropologi, orang Patani berasal dari suku Jawa-Melayu. Karena suku inilah yang pertama kali mendiami tanah Melayu. Kemudian berdatangan pedagang Arab dan India ke daerah Patani. Masuknya Islam ke Patani bukan dengan perang atau penaklukan, tapi melalui jalur dagang. Baik itu Indonesia, Malaysia, begitu juga Patani (Thailand). Namun, kapan masuknya Islam ke Patani tidak diketahui secara pasti. Tetapi, kalau melihat karya sastra sejarah dan merujuk kepada para sejarawan, maka dapat diperkirakan bahwa Patani menjadi negeri Islam pada tahun 1457 M.

Masuknya Islam ke Patani, juga seperti sebuah cerita khayalan atau dongeng. Tapi memang begitulah proses masuknya Islam kesana. Sebagaimana dikisahkan dalam buku-buku sejarah. Dikisahkan waktu itu, Patani dipimpin oleh seorang raja yang bernama Phya Tu Nakpa. Raja dikabarkan menderita sakit dan tidak kunjung sembuh. Dia mendengar, bahwa ada seorang bisa mengobati sakit raja dengan syarat raja harus masuk Islam setelah sembuh dari sakitnya. Raja menyetujui syarat sang tabib dan berjanji untuk masuk Islam setelah sembuh.

Lalu sang tabib pun mengobati raja. Tetapi, setelah sembuh sang raja mengingkari janjinya. Dia tetap saja memeluk agamanya. Kemudian raja sakit kembali dan diobati kembali. Kejadian itu terulang sampai tiga kali. Pada yang ketiga kalinya raja menyerah dan insaf. Setelah sembuh dari sakitnya, raja bersama keluarga dan pembesar istana memeluk Islam. Pada akhirnya, raja pun mengganti namanya menjadi Sultan Ismail Shah. yang bisa mengobati sakitnya. Sejak itulah Islam mulai berkembang di Patani dan ajaran Budha mulai ditinggalkan yang pada akhirnya hilang dari Patani. Islam berkembang dengan pesat di Patani tersebut. Dahulunya, Patani bukanlah bagian dari Thailand (Siam), melainkan daerah Islam yang berkembang dan maju di Selatan Siam. Sepeninggalnya, raja digantikan oleh putranya, Sultan Muzaffar Shah. Dia

meneruskan dan memajukan negerinya. Tidak hanya itu, Sultan Muzaffar Shah juga melakukan lawatan ke negara tetangga, termasuk Siam. Tapi lawatan Sultan Muzaffar tidak di terima baik oleh Raja Siam. Karena kesombongan Raja Siam, yang menganggap dirinya lebih terhormat, membuat Sultan Patani marah dan merasa direndahkan. Sehingga dia dan adiknya mengerahkan pasukan dan menyerang Siam yang ketika itu sedang diserang oleh Burma. Akhirnya, Siam jatuh ketangan Sultan Muzaffar saat itu juga. Tak lama kemudian, Raja Patani meninggal dan digantikan oleh adiknya. Sepeninggal adiknya, tahta diturunkan kepada putra Sultan Ismail Shah, yang menimbulkan masalah pada kesultanan. Mulailah terjadi perpecahan di dalam istana yang melibatkan keluarga raja juga putera-putera selir beliau.

Puncak keemasan dan runtuhnya Patani mencapai puncak keemasannya dizaman empat ratu yaitu; Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635), dan Ratu Kuning (1635-1651). Pada masa ratu-ratu tersebut, Patani sangat makmur dan kaya raya. Kekuasaannya pun meluas sehingga terkenal dengan sebutan Negeri Patani Besar. Kejayaan ini berlangsung selama 67 tahun. Ketika Ratu Kuning meninggal pada 1651, kejayaan Patani berkurang dan terjadi kemerosotan secara politik, ekonomi dan militer. Negeri Patani Besar meliputi; Kelantan, Terengganu, Patani Awal, Senggora dan Pethalung, yang tadinya bersatu mulai memisahkan diri. Bersamaan dengan kemerosotan ini, Siam bangkit dan berhasil mengusir Burma dari seluruh negeri. Patani ditaklukkan oleh Siam pada tahun 1785. Sejak saat itulah patani berada di bawah pemerintahan Siam. Pada tahun 1909, Patani resmi menjadi bagian dari Siam, yang kemudian mengganti nama dengan Thailand sampai saat ini.

Setelah Patani jatuh kepada tangan siam (Thailand) maka muncul beberapa masalah di Patani sepertinya Konflik yang terjadi di Thailand Selatan ini merupakan konflik yang sudah terjadi sejak abad ke-19 (Krisis Paknam) , dan setelah adanya pembagian batas wilayah Thailand Selatan (Patani, Yala, Narathivat dan Satun) yang menjadi kekuasaan kerajaan Thai

yang disetujui oleh Inggris. Kawasan Patani, Yala, dan Narathiwat, secara budaya masyarakat di wilayah ini merupakan masyarakat melayu dan sangat berbeda dengan Thailand (Siam), di provinsi ini Islam berkembang dengan sangat pesat (karena masih memiliki ikatan darah dengan etnis Melayu) karena provinsi yang masih serumpun, dan berbeda dengan Thailand yang mayoritas beragama Budha. Sekitar tahun 1930-an, terjadi perubahan sistem pemerintahan di Thailand, di mana sistem monarki absolut berganti menjadi sistem monarki parlementer, di mana parlemen didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan pemerintah pusat Thailand terhadap provinsi-provinsi di Thailand selatan.

Diskriminasi penguasa Thailand semakin terlihat setelah munculnya peraturan-peraturan lokal, masyarakat Thailand Selatan yang berbasiskan Islam harus dihapuskan & masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai, menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Puncaknya rasa tidak suka masyarakat lokal kepada pemerintah pusat, akhirnya berujung pada munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang anti pemerintah pusat,.

Konflik yang terjadi di Thailand selatan ini kerap dipandang sebagai konflik antar agama semata antara muslim Melayu di Thailand selatan melawan orang Thai (Buddha) yang mendominasi pemerintahan pusat Thailand. Namun jika kaji lebih mendalam, ada begitu banyak faktor yang menyebabkan konflik ini timbul selain faktor perbedaan agama, faktor-faktor seperti kesenjangan sosial, politik dan tindakan kasar aparat keamanan, diskriminasi rasial, serta faktor ekonomi yang tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah Thailand pusat. Pada tahun 1960 sebuah organisasi bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang dipelopori Ustad Haji Abdul Karim Hassan melakukan pemberontakan dimana-mana, organisasi ini berideologi Islam,

Dalam pergerakannya, selain melalui angkat senjata organisasi ini juga melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan & kesejahteraan para

penduduk, sehingga menarik perhatian masyarakat Patani untuk bergabung,

Namun pada tahun 2001, Badan Otonomi khusus itu dihapuskan dari wilayah Thailand Selatan, sehingga pada akhir tahun 2001 pemberontakan besar kembali terjadi dan munculnya kelompok bersenjata yang identitasnya tidak diketahui mengakibatkan 5 anggota polisi dan seorang relawan keamanan desa tewas. Tahun demi tahun pemberontakan dan penyerangan di Thailand selatan terus mengalami peningkatan dari sekitar 75 kasus di tahun 2002, meningkat menjadi 119 kasus di tahun 2003. Pada tanggal 28 April 2004, sekitar 100 orang anggota milisi menyerang 10 pos militer di Thailand selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan dan sebagian dari milisi tersebut kemudian bersembunyi di Masjid Krue Se, sebuah masjid yang sangat disakralkan oleh penduduk muslim lokal. Para tentara yang mengejar milisi kemudian menembaki masjid & menewaskan milisi-milisi yang bersembunyi di dalamnya. Peristiwa tersebut spontan memunculkan kemarahan para penduduk muslim lokal, dan sejak saat itulah perjuangan-perjuangan yang terjadi di Thailand Selatan mulai dikaitkan dengan agama Islam garis keras dan munculnya *Jihad*.

Sejak awal tahun 2005, organisasi-organisasi pergerakan yang berideologi Islam mulai terbentuk, misalnya Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP) dan Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para "pemain lama" seperti PULO & BRN juga muncul kembali. Jumlah anggota pemberontak pada fase ini meningkat tajam, jika dibandingkan dengan konflik pada fase-fase sebelumnya yang hanya melibatkan ratusan orang. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa, jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan & vandalisme pada waktu itu mencapai 30.000 orang. Para militan ini, selain melakukan aktivitas pemboman, juga sering melakukan aksi-aksi penembakan & pemotongan kepala kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk kepada para pemuka agama setempat. Bahkan setelah berakhirnya rezim Thaksin Shinawatra, yaitu pada bulan Agustus 2006 pemberontak meledakkan 22 bank di kota Yala,

selain itu kasus baru-baru ini tepatnya pada tanggal 9 Februari 2012, sebuah bom truk meledak di Thailand selatan dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 1 orang tewas, dan tanggal 31 Maret 2012 kembali menimbulkan korban di Yala sebanyak 3 orang. Korban tewas akibat konflik yang terjadi dari tahun 2004-2012 ini lebih dari 5000 jiwa.

Hingga saat ini pemerintah Thailand sebenarnya telah mengambil berbagai tindakan tegas dalam mengatasi pemberontakan di wilayah Thailand Selatan ini, diantaranya dengan adanya kerjasama militer dengan Amerika Serikat, China, Malaysia dan negara-negara lain dalam menangani konflik berkepanjangan yang terjadi di kawasan Thailand Selatan ini. Namun sampai saat ini konflik masih belum juga dapat diatasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, pokok masalah pada penelitian terhadap kehidupan masyarakat Muslim Patani, Baik dalam bidang Agama, etnis, Sosial, maupun politik. Bagaimanakah Perkembangan Politik di Thailand Selatan pada tahun 1785-Sekarang? Bagaimanakah kebijakan pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim warga patani?

Kondisi Masyarakat Muslim Patani di Thailand Selatan

Di Muang Thai, orientasi dunia Islam dan Budha berbeda, sesuai dengan perjalanan hidup mereka masing-masing. Keturunan Thai-Budha lebih dekat kepada negara Cina, India, Jepang, dan Sri Lanka, karena mereka penganut Budha Theravada, sementara masyarakat muslim Melayu Patani lebih mendekati dunia Melayu Nusantara dari kebudayaan dan peradaban Islam negara Arab.

Dalam menelaah asal-usul keturunan muslim di Muang Thai secara keseluruhan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok keturunan dari Syeikh Ahmad dan Muhammad Sa'id dari Persia, yang dikenal dengan *Kheak Cou Sen* (satu cabang Mazhab Syi'ah di Muang Thai), yang menetap dan berdagang di Muang Thai sejak kerajaan *dinasti Ayudya*, pada

abad ke-13 M. Karena kontribusi mereka terhadap Kerajaan Muang Thai serta pelayanan pribadinya kepada Raja, Syeikh Ahmad diberi jabatan penting dalam kerajaan dan dianugrahi gelar *Phra Ya Syeikh Ahmad Ratana Raja Setthi* yang bertanggung jawab dalam urusan dalam dan luar negeri. Inilah cikal bakal orang Islam di Muang Thai, dan sekarang keturunan mereka tersebar di bagian tengah Muang Thai.²

2. Kelompok mayoritas di bagian selatan adalah orang Islam Melayu (Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, Satun, dan sebagian dari Songkla). Daerah Muang Thai bagian selatan ini, merupakan basis masyarakat muslim Melayu adalah daerah konflik agama, budaya dan persengketaan wilayah dengan latar belakang etnis, budaya dan agama yang berkepanjangan. Wilayah bagian selatan merupakan daerah pusat muslim Melayu, dari perbatasan Malaysia sampai kawasan *Kbo Kra (Segenting Kra)*³
3. Kelompok yang terdapat di bagian utara, mereka adalah kelompok minoritas yang dikenal sebagai orang Cina Ho, dan terdapat juga kelompok yang berasal dari ras India atau Pathan, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu.

Konsep Melayu dalam bahasa lebih populer dikenal dengan istilah *Thai Muslim* atau *Thai Islam* oleh pemerintah Muang Thai. Dalam Undang- undang Kenegaraan, tahun 1945 M., untuk pertama kalinya umat Islam di Muang Thai secara resmi menjadi rakyat Thai yang menganut agama Islam (*Prachachon Chau Thai Thi Nabtue Sasna Islam*), hingga istilah Thai-Muslim ini memicu kontradiksi antara Thai-Muslim dengan Thai-Budha, karena istilah Thai dalam pemahaman masyarakat Islam merupakan sinonim dari kata Budha, sedangkan kata Melayu identik dengan Islam pada waktu itu.

Gambaran ke-Thaiian yang banyak digunakan,

²Bun Krom Dongbangsathan, *The Last War*, t.t., hlm. 5. Lihat juga. Samai Carunchang, *Yon Roi Muslim Siam*, (Bangkok: Mulnithi Phua Pathana Yauwacun Su Saphawa Phunam, 2012), hlm. 18.

³M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, hlm. 20. Lihat juga Samai Carunchang, *Yon Roi Muslim Siam*, (Bangkok: Mulnithi Phua Pathana Yauwacun Su Saphawa Phunam, 2012), hlm. 28.

mengandung aspek nasionalisme sekaligus kultural. Penggunaan istilah ke-Thaian secara jelas terlihat dari penggunaannya yang sering merujuk dan cenderung pada tiga lembaga tertinggi dalam negeri yaitu; lembaga kebangsaan (Chat), lembaga keagamaan (Sasna), dan lembaga Raja (*Phra Maha Kasatra*). Istilah ini berkaitan erat, bahkan secara eksklusif, dengan agama Budha dan budaya masyarakat Siam (Thai-Budha).⁴

Perlu diperhatikan, bahwa istilah *sasna* (agama) dalam konteks Muang Thai, hanya merujuk kepada norma-norma agama Budha, baik secara teoretis maupun praktis. Kenyataannya terdapat dalam *Rathamannun* (kanun-kanun kenegaraan) dan realitas masyarakat Muang Thai. Krisis dan konflik yang terjadi antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintah Muang Thai bertambah kuat. Keadaan dan situasi sosial-politik tersebut terus berlangsung tegang, karena Pemerintah Muang Thai meneruskan program integrasi dan asimilasi keagamaan dan kebudayaan atas masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan.

Dengan adanya program kebijakan pemerintah dalam membina masyarakat Muang Thai yang multi-kultural (Budha, Melayu, India, Cina) untuk mewujudkan perdamaian,⁵ maka pemerintah berwenang melaksanakan rencana ini dengan memberi sebuah dogma yaitu *Wattanatham Haeng Chat* (Kebudayaan Nasional). Rencana ini dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Kebudayaan Nasional, dengan dasar dan tujuan memberi kebebasan dalam menganut agama dan kebebasan dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan dan kebudayaan yang tidak tersentuh dengan meremehkan kelembagaan negara, agama, dan raja.

⁴ Terminologi "*Muslim Melayu*" digunakan untuk masyarakat negara Thai yang berbangsa dan berbahasa Melayu, yang ditunjuk sebagai "*Kbeak*" (tamu) dalam bahasa populer dengan "*Thai-Muslim*" atau "*Thai-Islam*" oleh pemerintah Thai.

⁵ Aek Tangsupvattana, Ora-orn Poocharoen, *Problem of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendation*, (Bangkok: Chulalongkorn University, 2009), hlm. 120.

Kedudukan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai berbeda dengan masyarakat Thai-Budha yang dominan dan berkuasa di Muang Thai dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi segi keagamaan, etnis, bahasa, budaya dan sejarah. Selain itu, masyarakat Melayu Patani mempunyai persamaan dan hubungan akrab dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa yang dominan di negara jiran Malaysia. Hal ini menjadikan masyarakat Melayu Patani sebagai masyarakat yang sensitif dalam isu-isu keagamaan dan kebudayaan di Muang Thai.⁶

Ketika kerajaan Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam dihapuskan pada tahun 1902 M., secara mutlak masyarakat Melayu Patani dalam keadaan sangat tertekan, khususnya pada periode pemerintahan Jenderal Luang Pibul Songgram (1939-1944 M.) dan Marshal Sarit Thanarath (1958-1963 M.), orang Melayu Patani menjadi mangsa dasar program asimilasi nasionalisme dan kebudayaan. Bahkan sampai sekarangpun masyarakat Melayu Patani masih menghadapi diskriminasi konflik keagamaan dan kebudayaan dan aksi teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan social keagamaan, kebudayaan, kependidikan, politik dan ekonomi orang Melayu Patani sangat terbatas dan sempit.

Sejak penaklukan yang dilakukan Kerajaan Muang Thai terhadap wilayah-wilayah Melayu Patani lebih dari dua abad yang silam, status keagamaan, kebudayaan, kependidikan, ekonomi dan politik masyarakat orang Melayu Patani makin terdesak. Desakan-desakan tersebut telah mengakibatkan timbulnya reaksi di kalangan orang Melayu Patani. Bagi orang Melayu Patani perubahan dalam sistem pemerintahan ini merupakan penjajahan atas bangsa mereka. Dalam kasus golongan orang Melayu Patani, bahwa faktor agama, bangsa, bahasa, budaya dan kesadaran akan suatu identitas tersendiri telah dimobilisasi untuk mengkonsolidasikan solidaritas keislaman dan kemelayuan dalam menahan upaya-upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan oleh

⁶Malise Ruthven, Azim Nanji, *Historical Atlas of Islam*, (Massachusetts: Harvard University Press Cambridge, 2004), hlm. 153.

Pemerintah Muang Thai.

Strategi Pemerintah Muang Thai terhadap masyarakat orang Melayu Patani dengan memberi keleluasan dan kelonggaran dalam melaksanakan aktivitas keagamaan dan kebudayaan, telah memberi hasil dan kesan dalam mendorong masyarakat Melayu Patani untuk bersikap pro dan terbuka terhadap pemerintah. Pemerintah Muang Thai menyediakan bantuan dalam mengurus masalah yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan dan kebudayaan. Program ini disusun oleh Pemerintah Muang Thai dalam rangka memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

Di satu sisi, program migrasi penduduk Thai-Budha ke daerah Patani telah meningkat jumlah penduduk non-muslim di daerah Patani. Dampak dari program ini telah menimbulkan pengaruh psikologis dan sosial orang Melayu Patani di Muang Thai Selatan. Percampuran dua budaya antara Melayu dengan Siam telah mendorong keberhasilan program integrasi. Akibatnya, lahirlah perubahan kebudayaan. Golongan yang berpendidikan Thai umpamanya, mempunyai hubungan erat dengan kaum yang berbudaya lain sehingga ada pengambilan kebudayaan asing sebagai ciri budayanya sendiri.

Sistem Sosial Orang Melayu Patani

1. Sistem Keagamaan

Terbentuknya sistem keagamaan dalam masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan, secara umumbekaitan dengan letak geografis yang jauh dari pusat Islam. Dalam kajian klasik para Islamisis, bahwa posisi geografis bumi Semenanjung Melayu yang jauh dari pusat Islam, sehingga wilayah- wilayah Melayu ini disebut dengan Islam pinggiran. Kedatangan dan perkembangan Islam di Patani bolehdikatakan bahwa Islam telah menjadi suatu tradisi tersendiri yang tertanam dalam konteks sosio-religius, budaya, ekonomi, dan politik selama tujuh abad dalam sejarah Kesultanan Islam Melayu di Patani.⁷

Keyakinan terhadap ajaran Islam yang diterima oleh

⁷Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, *Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar Vanve), hlm. 1.

masyarakat Melayu Patani dinilai sebagai suatu ajaran yang sesuai dan relevan dalam setiap konteks ruang dan waktu. Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan pendapat para ulama merupakan referensi yang menjadi dasar pegangan keyakinan tersebut, sehingga kesakralan sumber keagamaan ini tidak dapat disentuh kecuali oleh para ulama yang dapat memberi suatu keterangan tentang Islam yang terkandung dalam sumber ajaran Islam. Dalam masyarakat Melayu Pataniterdapat suatu persepsi yang terintegrasi mengenai agama, nilai-nilai tradisional, sukar bagi masyarakat Melayu Patani untuk memisahkan nilai-nilai Islam dari kebudayaan Melayu.

Desain umum sistem keagamaan dalam masyarakat Melayu Patani yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya, menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam berfungsi dalam kehidupan masyarakat Melayu Patani. Nilai-nilai Islam sebagai referensi bagi tindakan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nilai-nilai Islam dan kebudayaan Melayu saling menyerap dan membentuk serta mempersatukan masyarakat Melayu Patani, sehingga dalam perwujudan desain umum keagamaan yang dijadikan pedoman oleh masing-masing individu dalam masyarakat diwarnai oleh lingkungan sosial-budaya dalam masyarakat Melayu Patani.

Jejak-jejak kepercayaan dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh amalan-amalan warisan masa lalu telah menghasilkan suatu yang saling melengkapi antara Melayu dan Islam di masyarakat Melayu Patani. Dengan menggunakan simbol budaya, cara hidup, bahasa, perilaku, dan adat istiadat setempat jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat.⁸ Pengaruh peradaban dan kebudayaan awal Melayu Langkasuka pada zaman pra-Islam (animis, dinamis dan Hindu-Budha) terlalu penting dan meninggalkan kesan mendalam dalam adat istiadat kehidupan masyarakat Melayu Patani sampai saat ini.

Penegasan kembali terhadap identitas kebudayaan Islam Melayu Patani pada kenyataannya merupakan salah satu tujuan dari gerakan-gerakan yang diperjuangkan oleh generasi dahulu. Penegasan kembali jati diri Islam Melayu yang menunjukkan

⁸Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun*, (Jakarta: Para Madina, 1995), hlm. 548.

akan nilai-nilai budaya Islam Melayu merupakan akibat dari dinamika internal dalam masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai Islam untuk mengadakan adaptasi dan penyesuaian seperlunya dengan budaya Melayu.

Ritual keagamaan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Patani, baik ritual *fardiyyah* maupun ritual *jama'iyah* merupakan salah satu wujud dari kebudayaan yang berperan dan berfungsi membentuk dan menciptakan sebuah solidaritas dalam masyarakat Melayu Patani. Hal tersebut mempunyai arti bahwa nilai-nilai Islam merupakan pelengkap yang berfungsi untuk mempererat ikatan persaudaraan antara individu warga masyarakat, sebagaimana Radcliffe-Brewn melihat bahwa, fungsi agama dalam berbagai peribadatan memiliki fungsi sosial tertentu dan dalam batas tertentu. Peribadatan tersebut berfungsi untuk mengatur dan mentransmisikan berbagai segmen, dari satu generasi untuk generasi selanjutnya sebagai salah satu acuan pokok bagi terbentuknya aturan masyarakat yang bersangkutan.

Kehadiran Islam dalam masyarakat Melayu Patani sampai saat ini terus berkembang, dengan semangat dan kesadaran intelektual di kalangan masyarakat Melayu Patani telah membangkitkan kesadaran keagamaan serta kebudayaan. Islam telah membuat orang Melayu Patani lebih sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam sebagai daya tarik yang menggerakkan kesadaran dalam menghayati kebudayaan Islam Melayu.

2. Sistem Kebudayaan

Sistem kebudayaan dalam masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan, tercatat dalam sejarah telah mencapai suatu peradaban modern yang diketahui keberadaannya sejak abad kedua Masehi ketika muncul kerajaan Melayu Langkasuka. Seorang pengembara Cina menyatakan bahwa kebudayaan Melayu telah maju dan berkembang terutama pada abad ke-6 M.⁹ Mubin Sheppard, menyatakan bahwa Patani merupakan

⁹ Ahmad Fathy, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Star: Pustaka Darussalam, 1994), hlm.

sebuah negeri Semenanjung Melayu yang mempunyai banyak khazanah kebudayaan, dalam penjelasannya:

"With its long record of highly developed economic and aesthetic, eminence extending over more than thousands, there can be no doubt that the kingdom of Patani was the center of an elaborate Malay culture, with the advantages of a long period of uninterrupted royal patronage. Music, dancing, drama, metal working, weaving and wood carving all flourished at a level of excellence which could be compared favourably with the arts of Cambodia. But by a change of destiny, the region where the Malay peoples reached, and for centuries maintained their highest level of independent prosperity and of culture eminence, has been cut off from the rest of the Malay Peninsula, and almost all traces of their past splendour have been lost under an alien rule".

Keberagamaan masyarakat Melayu Patanidi Muang Thai Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan penghayatannya mengenai nilai-nilai itu sendiri, tetapi juga oleh bentuk adaptasi yang diterima dan yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai budaya, oleh karena kondisi dan letak geografis setempat juga ikut berfungsi dalam membentuk tata cara hidup dan *nizam-nizam masyarakat*, terutama dalam perilaku atau adat istiadat dalam masyarakat. Perjalanan sejarah kebudayaan Melayu Patani, pengaruh kebudayaan dari Funan, Sriwijaya, dan Majapahit telah melahirkan Patani menjadi sebuah pusat yang dipenuhi dengan tamadun Melayu pada zaman kejayaannya. Pernyataan ini telah disetujui oleh para sejarawan dan budayawan bahwa negeri Patani pernah menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Melayu di Bumi Semenanjung Melayu.

Faktor yang menyebabkan tetap kuatnya kesadaran, kesetiaan dan rasa keterikatan kultural bagi masyarakat Melayu Patani adalah peran sejarahnya. Dalam catatan sejarah, negeri Patani merupakan salah satu pusat peradaban dan kebudayaan Islam Melayu yang terpenting di kawasan Semenanjung Melayu. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan para ulama

berfungsi sebagai penghubung dan kekuatan dalam menentukan dan selalu memberikan inspirasi yang riil kepada harapan masyarakat awam dalam memperoleh identitas. Kekuatan inspirasi tersebut menjadi dasar dalam peran sejarahnya, sistem sosial, baik dalam urusan yang menyangkut dengan urusan keagamaan dan kemasyarakatan diatur oleh masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini para ulama yang berfungsi dalam bidang pendidikan keagamaan, pemimpin keagamaan dalam masyarakat, bahkan urusanduniawi sekalipun.

Masyarakat Melayu Patani menurut tipologinya dapat dibagi sebagaimana yang digambarkan oleh Surin Pitsuwan, bahwa masyarakat Melayu Patani seperti masyarakat Muslim Jawa yang dilukiskan oleh Geertz. Orang-orang Melayu Patani juga dibagi dalam kategori abangan dan santri. Golongan abangan, yaitu golongan muslim marginal yang mengutamakan ritual-ritual dan praktek animisme, adapun golongan santri yaitu golongan muslim yang lebih berpengetahuan dan menaruh perhatian terhadap kemurnian ajaran agama, tetapi dalam konteks masyarakat Melayu Patani hal tersebut dinyatakan dengan istilah orang '*alim*' dan orang '*awam*'.¹⁰

Kedudukan dan keadaan sosial kemasyarakatan Melayu Patani dianggap sebagai masyarakat yang sangat terisolasi dari masyarakat mayoritas Thai Budha. Karakteristik sosial dan kebudayaannya juga terisolasi sehingga masyarakat Melayu Patani menjadi masyarakat pedesaan dan masyarakat tertutup. Istilah masyarakat pedesaan dan masyarakat tertutup dalam konteks masyarakat Muang Thai umumnya mencerminkan kehidupan sosial di perkotaan yang secara dominan merupakan daerah Thai-Budha.

Hal tersebut menjadi alasan bahwa faktor keagamaan dan kebudayaan yang merupakan unsur paling penting dari identitas Melayu Patani, sebagai akibat dari kecenderungan untuk menjauhkan diri dari orang asing, khususnya penganut agama lain (dalam konteks agama Budha). Pandangan yang fungsionalistis dan perbedaan logika dari nilai-nilai keagamaan

¹⁰Surin Pitsuwan, *Islam di Muang Thai*, hlm. 139.

dan kebudayaan menjadi salah satu penyebab nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan mendominasi penyajian sehingga mempunyai peranan penting yang harus dimainkan oleh masing-masing individu dalam masyarakat.

Nilai-nilai Islam dalam masyarakat Melayu Patani telah mempengaruhi jalannya perkembangan pemikiran terhadap agama. Hubungan antara agama Islam dan masyarakat Melayu Patani telah memberi banyak kemungkinan, bahwa kebudayaan Melayu Patani yang didasari oleh nilai-nilai Islam telah menimbulkan suatu kesadaran baru mengenai identitas etnik yang membedakan orang Melayu Patani dari orang Siam atau Thai Budha.¹¹

Bagian terbesar dari interaksi sosial dalam konteks ritual keagamaan dan kebudayaan cenderung untuk memperkuat identitas keagamaan Islam dan kebudayaan Melayu, hingga pada kenyataannya nilai-nilai Islam merupakan unsur penting bagi identitas kebudayaan Melayu Patani, dan menganggap aturan hukum Islam sebagai aturan yang mengikat secara moral.

Dalam masyarakat Melayu Patani tidak pernah terjadi kasus perkawinan beda agama atau beda keyakinan, dalam hal ini, menurut catatan laporan Majelis Agama Islam Wilayah Yala, bahwa berlaku pertukaran agama bagi orang Budha (khususnya para tentara yang bertugas di tiga provinsi selatan Muang Thai) dengan perkawinan pada lima tahun terakhir ini berjumlah sekitar 10042 200 orang pertahun.

Titik tolak keadaan kerukunan yang bertambah baik bagi masyarakat Melayu Patani adalah kecenderungan etis kehidupan, hidup berkeluarga dan berkarabat, penuh kasih sayang dan sikap tolong menolong, ditambah dengan sifat keyakinan terhadap nilai-nilai keagamaan dan kerukunan terhadap adat istiadat, dan dengan demikian melahirkan kehidupan masyarakat Melayu Patani yang memiliki kesadaran keagamaan dan kebudayaan.

Di sisi lain, kebudayaan asing dengan pengaruh era globalisasi (kebudayaan Barat) tersebar dan semakin

¹¹ Farid Mat Zim, *Minority Muslim di Thailand*, (Selangor: Minda Bandar Baru Bangi, 1998), hlm. 8.

memperoleh tempat di kalangan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan, terutama di kalangan generasi mudanya. Dampak gaya hidup dalam masyarakat Melayu Patani, misalnya berbagai gaya hidup modern, penggunaan bahasa dalam komunikasi dengan bahasa Thai, berpakaian ala Barat yang sama sekali tidak menggambarkan ciri-ciri kebudayaan Islam Melayu.

Walaupun generasi baru sudah banyak terpengaruh dengan kebudayaan Thai, terutama dalam mengguna bahasa Siam, tetapi dapat menunjukkan bahwa bahasa Melayu tetap terjaga dalam masyarakat. Dalam mewariskan bahasa Melayu yang menjadi peninggalan bernilai bagi masyarakat Melayu Patani, para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat telah memberi kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga kebudayaan Melayu, sehingga terdapat pepatah Melayu "*basa nayu adalah jiwa bagi bangsa nayu*".

Bahasa Melayu merupakan simbol nasionalisme terpenting, sehingga nasionalisme Melayu tidak bisa digambarkan tanpa bahasa Melayu. Dengan kehilangan bahasa, maka jati diri bangsa itu juga akan hilang pula.

Dalam struktur kepemimpinan dalam masyarakat Melayu Patani, kepemimpinan terdiri dari kalangan para ulama. Mereka berperan dalam hal keagamaan dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, serta berperan penting dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas bersama dengan masyarakat seperti melaksanakan kegiatan pengajian, pelaksanaan ritual keagamaan dan kebudayaan dalam masyarakat, dan urusan berhubungan dengan pihak pemerintah di bidang keagamaan.

Adapun kepemimpinan masyarakat yang terdiri dari *kamnam* dan *phu yai ban*, bertugas untuk memimpin dan mengurus perkara yang berkaitan dengan urusan pemerintah, kedudukan mereka sebagai perantara dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Belakangan ini, dengan kedua jenis pemimpin ini timbul persaingan satu sama lain untuk menjadi pemimpin dan panutan bagi warga masyarakat. Persaingan tersebut berkaitan dengan perkembangan politik

pada peringkat daerah setempat dan nasional.¹²

Di sisi lain, akibat komoditas pasar yang meluas dan berkembang, media massa dan informasi serta pengetahuan berkembang dengan cepat, meskipun pembangunan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan diabaikan, tetapi masyarakat Melayu Patani sangat tertarik pada permasalahan tersebut. Hal ini disebabkan karena banyak di kalangan masyarakat Melayu Patani yang mulai merasa gelisah terhadap cepatnya pengambil-alihan gaya hidup asing sehingga masyarakat Melayu Patani menyadari dan merangsang minat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan Melayu tradisional.

Ketidaknyamanan kehidupan modernitas berhubungan dengan nilai-nilai yang selalu berubah, dinamika ekonomi, sosial keagamaan, dan kebudayaan yang telah memberi kesan mendalam terhadap gaya hidup masyarakat Melayu Patani. Dari hal tersebut seakan-akan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu telah tergantikan, sehingga kekhawatiran generasi tua bahwa kemajuan hanya bersifat dangkal. Dengan demikian mereka berharap nilai-nilai yang lebih bersifat rohani dibangkitkan kembali, karena perubahan nilai-nilai adalah perubahan yang paling penting dalam kebudayaan yang mempengaruhi norma-norma etika, tata cara hidup, dan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu dalam masyarakat.

3. Sistem Pendidikan

Patani dalam sistem pendidikan Islam di kepulauan Semenanjung Melayu dalam sejarah, memang besar. Pada zaman kejayaan Patani, telah dicapai puncak kemajuan dalam bidang pendidikan dan perkembangan pemikiran serta penghayatan ajaran agama Islam. Seiring dengan itu muncullah barisan para ulama dan pemuka gerakan Islam yang sangat berjasa.

Puncak kekuasaan Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam, pada awal abad ke-17 M., diletakkan dasar-dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Perkembangan awal sistem pendidikan Islam di Patani telah memberi kesan

¹²Manot Pacjhri, "*Masyarakat Melayu dalam Nakhon Sri Thammarat*", Aman Damai, No. 4, Desember 2007, hlm. 16.

dalam melanjutkan pusat pengajian tradisional *ponok*, yang diterapkan dalam sistem pengajian dan pembelajaran yang berkiblat kepada Masjidil Haram Mekah. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan yang semakin intensif antara negara Arab yang menjadi pusat agama Islam.

Pada abad ke-19 M., Patani muncul sebagai pusat kajian dan keilmuan yang berunsur Islam di Semenanjung Melayu, yang melahirkan ulama-ulama terkemuka, sehingga Patanidihormati sebagai tempat kegiatan keilmuan Islam yang mengajarkan hukum agama yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis Nabi, melanjutkan institusi pengajian *ponok*, di samping mengembangkan bahasa Arab-Jawi.¹³ Pada zaman itu Patani Darussalam telah menghasilkan banyak sarjana Islam yang menulis karya-karya keagamaan dan terjemahan dari karya sarjana Arab.¹⁴

Pengalaman kependidikan keagamaan dalam masyarakat Melayu Patani sangat berbeda dengan pengalaman kependidikan masyarakat muslim di negara lain, seperti di Indonesia dan Malaysia. Jika sistem kependidikan agama dan sekolah sekuler di Indonesia dan Malaysia adalah bersifat dualistik, manakala di Muang Thai Selatan sifatnya lebih kepada kontradiktif. Lembaga pendidikan *ponok* dan madrasah yang menawarkan pelajaran-pelajaran agama cenderung lebih disenangi ketimbang sistem sekolah pemerintah. Masyarakat Melayu Patani merasa lebih *at-home* dengan *ponok* dan madrasah dikarenakan bahwa bahasa Melayu yang digunakan.

Pada tahun 1966 M., dengan Undang-undang Kependidikan Nasional bahwa setiap institusi pendidikan keagamaan *ponok* diwajibkan untuk mendaftar secara resmi kepada pihak pemerintah di bawah akta *Rong Rian Rasd Sorn Sasna Islam* (sekolah swasta pendidikan agama Islam), sejak itu, lembaga pendidikan keagamaan *ponok* di Patani mengalami perubahan menjadi lembaga pendidikan yang sistematis dan terantau oleh Kementerian Kependidikan Nasional. Usaha-usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan, Pemerintah

¹³Mohd.Zambari A. Malek, *Umat Islam Patani*, hlm. 238.

¹⁴Surin Pitsuwan, *Islam di Muang Thai*, hlm. 38.

Muang Thai mendorong sistem sekolah agama swasta (*madrasah*) yang dapat mengakomodasikan kurikulum agama dan kurikulum umum. Dengan langkah ini, madrasah menjadi semakin populer dikalangan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan. Pendidikan keagamaan dengan sistem dualisme (pelajaran agama dan pelajaran sekuler) ini terus berkembang di Patani, dan dalam masa yang sama kependidikan keagamaan dengan sistem *ponok* mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Meski demikian, pendidikan keagamaan dengan sistem *ponok* tidak terhapus sama sekali meskipun "education improvement" rencana pemerintah Muang Thai kuat digalakkan.

Pelajaran nasional Thai dijalankan seiring dengan pengajaran nilai-nilai agama Budha, karena pegawai yang beragama Budha mendapat peran utama dalam bidang pendidikan. Orang Melayu Patani menganggap dan menolak pendidikan nasional Thai, karena mereka merasa hal tersebut adalah usaha awal dari pihak Pemerintah Muang Thai untuk menghapus dan menghilangkan kesadaran keagamaan dan kebudayaan dari generasi muda.

Dalam pandangan orang Melayu Patani, dengan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah nasional Thai, ini berarti mereka telah mengajarkan anak-anak mereka meninggalkan identitas mereka sebagai seorang yang berketurunan Melayu dan beragama Islam. Karena kekhawatiran anak-anak mereka akan disiamkan, maka kebanyakan orang Melayu Patani enggan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah pemerintah yang dikendalikan oleh pegawai yang menganut agama Budha. Hal yang paling serius adalah mereka menganggap bahwa anak-anak yang tidak mempelajari dan menguasai bahasa Melayu (Arab-Jawi) tidak akan dapat memahami ajaran-ajaran agama. Dampak negatif dari hal ini sudah menjadi kenyataan bahwa masyarakat Melayu Patani, menganggap anak-anak mereka akan mengabaikan tradisi Islam Melayu sebagai suatu cara hidup mereka.

Memandang taraf dan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat Melayu Patani yang rendah, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya minat orang tua terhadap

pendidikan sekuler. Kebanyakan orang tua lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan agama, karena mereka lebih senang melihat anak-anak mereka menjadi seorang yang saleh, taat kepada perintah agama, dan adanya pandangan bahwa dengan pendidikan sekuler akan membawa kepada hal yang tidak islami. Sebagai sebuah harapan dan cita-cita bagi masyarakat Melayu Patani dewasa ini adalah mengembalikan hak-hak sipil dalam bentuk pendidikan, dengan menjamin hak-hak kelembagaan dan institusi pendidikan informal seperti *ponok*, madrasah, dan taman didikan kanak-kanak yang telah berkembang di Patani sejak lama.

Jadi yang dialami masyarakat Melayu Patani di wilayah Muang Thai Selatan, ungkap sejarawan Nidhi Aeusrivongse, dalam sebuah tulisannya, *Sillapa Wathanatham* (Juni: 2004), bahwa karena faktor kemiskinan dalam semua bidang, umat Melayu Patani tidak berhasil merespon perubahan yang selalu mengganggu mereka secara luar biasa. Faktor terpenting yang mereka lihat dapat memajukan mereka adalah sistem pendidikan. Akan tetapi, jalan ini tidak begitu terbuka oleh mereka. Menurut pandangan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan, sekarang banyak umat Islam yang ingin belajar tetapi tidak ada kesempatan dan tempat bagi mereka. Meskipun mereka berusaha menyesuaikan diri dengan sistem kapitalis Muang Thai.¹⁵

4. Sistem Politik

Sejarah politik golongan orang Melayu Patani secara definitif dimasukkan di bawah kekuasaan Kerajaan Siam. Kedudukan orang Melayu Patani merupakan suatu golongan minoritas yang terjebak di tengah revitalisasi dan kebangkitan ideologi aksi politik yang dihadapkan pada dua dilema. Bagi orang Melayu Patani hanya ada dua pilihan yaitu pertama; menyesuaikan diri secara pasif, suatu hal yang sangat tidak menyenangkan, mengingat karakteristik keagamaan dan kebudayaan mereka, dan kedua; menentang dengan berbagai

¹⁵A. Suryana Sudrajat, Cahaya Nusantara, *Patani Negeri Selalu Resah*, No. 8, 26-042007, hlm. 7.

aksi protes dan perlawanan. Agama dan budaya merupakan suatu simbol yang terpenting dalam memberi aspirasi dan berfungsi sebagai suatu bangsa yang dikuasai oleh bangsa lain, yang di dalam masyarakat Melayu Patani tetap muncul dalam kesadaran sikap perlawanan.

Dari problem rasial dalam politik Muang Thai, timbul pengelompokan orang Melayu Patani menjadi dua golongan, yaitugolongan yang disebut golongan *assimilated group*, atau golongan yang terasimilasi atau berbaur dengan kaum mayoritas masyarakat Thai-Budha pada segala bidang tatanan kehidupan,namun tidak sampai pada masalah keagamaan.Golongan yangkedua disebut golongan *unassimilated group*, atau golongan yang tidak berbaur, namun menyendiri di Muang Thai bagian selatan, yang masih menunjukkan budaya Islam Melayu pada nama, bahasa dan adat.Golongan ini bertempat tinggal di bagian selatan yaitu di kawasan Provinsi Pattani, Narathiwat, dan Yala.

Dalam politik Muang Thai terhadap masyarakat Melayu Patani, terdapat unit khusus untuk mengawasi dan menjaga keamanan negara yang diselenggarakanpada bidang-bidang yang penting, yaitu bidang ketentaraan bagian selatan yang disebut dengan *Kong Thap Pak Ti Si* (Angkatan Tentara Bagain ke-4), dan pemerintahwilayah di bagian selatan dibentuk badan khusus yang disebut denganSun *Ammuia Karn Boribarn Sam Cangwad Cai Dean Pak Tai* (pusat arahan pentadbiran tiga provinsi sempadan selatan Muang Thai).

Pemerintah Muang Thai memasuki dunia sosial-religius dan sosial- budaya masyarakat Melayu Patani yang mengakibatkan semakin memungkinkan terjadinya konfrontasi dalam ranah sosio-politik. Dalam tatanan sosio-politik, orang Melayu Patani mendapatkan julukan yang kurang baik, yaitu dengan kata *khæek* yang berarti pendatang atau tamu, meskipun pada mulanya perkataan *khæek* merupakan istilah untuk makro-etnis bagi orang-orang selain kebangsaan Thai,tetapi istilah tersebut dipakai pemerintah untuk mendeskripsikan

orang Melayu Patani di Muang Thai Selatan.¹⁶

Kedudukan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai sangat berbeda dengan masyarakat Budha yang dominan dan berkuasa di Muang Thai dalam berbagai aspek, dari segi keagamaan, etnis, bahasa, budaya hidup dan sejarah. Tambah lagi masyarakat Melayu Muang Thai Selatan mempunyai persamaan dan hubungan akrab dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa yang dominan di negara jiran Malaysia. Hal ini menjadikan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan sebagai masyarakat yang lebih sensitif dalam isu-isu keagamaan dan kebudayaan di Muang Thai.

Bagaimanapun, penting dicatat bahwa istilah *sasna* (agama), dalam konteks Muang Thai, hanya merujuk kepada agama Budha khususnya, baik secara teoretis maupun praktis. Kenyataannya terdapat dalam kanun-kanun negara dan realitas masyarakat Muang Thai secara umumnya Budhis adalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari ke-Thai-an. Dengan itu, krisis dan konflik yang berlaku antara masyarakat Melayu Patani dengan Pemerintah Muang Thai bertambah kuat. Keadaan dan situasi sosial-politik terus berlangsung secara tegang karena Pemerintah Muang Thai meneruskan pelaksanaan program integrasi dan asimilasi atas masyarakat Melayu Patani.

Desakan-desakan tersebut telah menimbulkan reaksi dari warga masyarakat, bagi orang Melayu Patani perubahan dalam sistem pemerintahan ini adalah satu penjajahan atas negeri dan bangsa mereka. Dalam kasus golongan Melayu Patani di Muang Thai Selatan, faktor agama, bangsa, bahasa, budaya dan kesadaran akan suatu identitas tersendiri telah dimobilisasi mengonsolidasikan solidaritas keislaman dan kemelayuan dalam menahan upaya-upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan oleh Pemerintah Muang Thai.¹⁷

Dewasa ini, dengan usaha dan upaya Pemerintah Muang

¹⁶Thanet Aphornsuwan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, (Bangkok: Thammasat University, 2003), hlm. 5.

¹⁷Aek Tangsupvattana, Ora-orn Poocharoen, *Problem of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendation*, (Bangkok: Chulalongkon University, 2009), hlm. 34.

Thai dalam memberlakukan berbagai kebijakan, ujung dari kebijakan tersebut yang bagi masyarakat Melayu Patani adalah suatu kebijakan yang bisa ditebak akan membawa akibat kehancuran pewarisan peradaban dan kebudayaan Islam Melayu. Salah satu contoh yang mudah dilihat adalah pemberangusan lembaga pendidikan Islam tradisional *ponok*. Memang itu sengaja dipilih bukan suatu kebetulan, karena *ponok* dalam sejarahnya memainkan peranan penting yang sangat vital, mati dan hilangnya citra tradisi *ponok* akan mengantarkan masyarakat Melayu Patani pada ajalnya secara sistematis. Kebijakan Pemerintah Muang Thai yang memasukkan kurikulum pendidikan sekular dalam lembaga pendidikan tradisional *ponok* dengan menggunakan bahasa Thai diganti dari bahasa Melayu-Arab dalam buku pelajaran adalah suatu hasil yang besar akan mengurus identitas kemelayuan.

5. Sistem Ekonomi

Secara geografis, Muang Thai Selatan merupakan kawasan yang sangat subur dan kaya dengan hasil bumi. Kawasan Muang Thai Selatan mempunyai hutan dan bukit yang sangat luas. Masyarakat Melayu Patani sebagian besar berlatar belakang sebagai penduduk pedesaan, pekerjaan mata pencaharian sebagai nelayan, petani padi dan pekebun getah (karet).

Mayoritas masyarakat Melayu Patani memiliki lahan tanah yang sangat kecil, sementara harga bahan mentah seperti harga getah, buah-buahan dan padi sangat rendah, sebagai akibat dari ulah para pemodal, yang pada umumnya terdiri dari orang Cina dari perkotaan. Sebagai penduduk pedesaan, pada dasarnya mereka adalah produsen-produsen berskala kecil yang menggunakan teknologi non-mekanik dan tradisional.

Di sisi lain, faktor kerusakan yang berlarut-larut disebabkan oleh konflik politik di daerah-daerah Muang Thai Selatan telah mengakibatkan merosotnya tingkat produksi dan taraf hidup ekonomi warga masyarakat Melayu Patani. Kini ribuan warga Melayu Patani berhijrah memasuki negara jiran Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menjamin

kehidupan perekonomian bagi mereka dan keluarga.

Dalam rencana peningkatan status kesejahteraan perekonomian masyarakat Melayu Patani, pihak kerajaan Muang Thai telah mengadakan suatu program dengan membuka lahan tanah pertanian untuk membangun lahan perkebunan karet. Pembukaan dan pemberian lahan ini merupakan suatu rencana kebijaksanaan pemerintah dalam membina dan memajukan perekonomian masyarakat Melayu Patani. Program peningkatan perekonomian ini yang dikenal dengan program *Skim Nikom Sanrg Ton Eng* (Wilayah Berdikari). Namun, masyarakat Melayu Patani menilai bahwa program tersebut lebih bermotif politik dibandingkan meningkatkan taraf perekonomian rakyat. Dalam kenyataannya, sebagian besar lahan yang diberikan dalam program ini dimiliki oleh orang Thai-Budha yang datang dari bagian utara Muang Thai, karena masyarakat Thai-Budha menjadi golongan dominan di perkampungan program ini.

Selanjutnya, program *Prarajdamri* yang dikendalikan oleh keluarga raja secara langsung. Program ini termasuk juga dalam program pembangunan di bawa hasrat integrasi. Program ini bertujuan memberi bantuan dan pertolongan kepada masyarakat Melayu Patani dalam berbagai aspek, khususnya di bidang pendidikan dan sebagainya. Kemudian program *Tai Rom Yen* (Kebahagiaan Wilayah Selatan) dikendalikan oleh pihak tentara yang dipimpin secara langsung oleh pegawai tertinggi pemerintahan keselamatan wilayah Melayu.

Dengan pelaksanaan program peningkatan perekonomian yang direncanakan oleh pemerintah, mengakibatkan warga masyarakat Melayu Patani menghadapi masalah yang sangat rumit. Hal tersebut dikarenakan program yang dirancang oleh pemerintah, yang hasilnya mengurangi hak-hak kepemilikan lahan tanah bagi warga masyarakat Melayu Patani yang akibatnya menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut semakin memburuk dengan penambahan penduduk Thai-Budha dari bagian utara Muang Thai yang telah dibawa masuk untuk menyertai program tersebut.

Sejak tahun 1980-an, dalam program peningkatan perekonomian rakyat terdapat suatu fenomena baru yang memberi dampak negatif dalam perubahan sistem sosial ekonomi dalam masyarakat Melayu Patani, khususnya perubahan di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan pantai, misalnya mulai membuka industri-industri dan perusahaan yang dimodali oleh para pemodal asing dengan menyewa dan membeli lahan.

Problem sosial-ekonomi yang tidak dapat diatasi secara langsung menyebabkan masyarakat Melayu Patani terpaksa meninggalkan pekerjaan tradisi orang Melayu Patani seperti nelayan, pekebunan dan sebagainya dengan mencari pekerjaan baru di luar negeri. Di samping itu, kaum wanita yang bekerja di pabrik-pabrik asing, faktor ini memberikan suatu kesan negatif secara tidak langsung dari aspek sosial keagamaan dan kebudayaan di kalangan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan.

Perubahan di bidang ekonomi ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan orang Melayu Melayu Patani. Rencana pembangunan perekonomian mengakibatkan peningkatan kesejahteraan jasmani bagi keseluruhan warga masyarakat, sehingga peningkatan standar kehidupan dan pendidikan lebih meningkat dengan pesat. Kurangnya ekonomi juga memberi dampak negatif terhadap pendidikan sehingga kurangnya kesadaran keagamaan dan kebudayaan. Dalam memberi gambaran tentang status perekonomian dan pekerjaan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan, penulis mengemukakan profesi di masing-masing provinsi:

- a. Provinsi Pattani yang mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu yang beragama Islam. Geografinya memiliki keindahan alam seperti air terjun dan pantai pasir putih. Mata pencaharian penduduk Provinsi Pattani adalah perkebunan karet, perkebunan buah-buahan dan nelayan. Produk Provinsi Pattani yang terkenal adalah ikan asim, kerudung, dan busana muslim serta kesenian produk pakaian batik. Provinsi Pattani merupakan pusat muslim yang memiliki ratusan pondok dan masjid. Salah satu masjid

terbesar dan terindah adalah Pattani Central Mosque. Provinsi Pattani berjarak 99 km dari Songkla dan 1.055 km dari ibu kota Bangkok.

- b. Provinsi Yala, merupakan provinsi yang berbatasan dengan Perak dan Perlis, Malaysia. Kondisi geografisnya terdiri dari pegunungan, hutan, dan air terjun. Mata pencaharian penduduk Provinsi Yala adalah petani padi dan perkebunan karet serta produk-produk herbal. Letaknya Provinsi Yala berjarak 128 km dari Songkla dan 1.084 km dari ibu kota Bangkok.
- c. Provinsi Narathiwat, merupakan provinsi yang terletak di paling selatan Muang Thai, berbatasan langsung dengan Kelantan, Malaysia, dengan jalur kereta api yang berakhir di *Sungai Kolok*. Provinsi Narathiwat berjarak 194 km dari Songkla dan 1.149 km dari ibu kota Bangkok. Mata pencaharian penduduk Provinsi Narathiwat adalah perkebunan karet, perkebunan buah-buahan dan nelayan. Produk Provinsi Narathiwat yang terkenal adalah buah-buahan.

Analisis Perkembangan Politik Masyarakat Muslim Thailand Selatan

Persepsi-persepsi tersebut memerlukan penelitian lanjutan dengan lebih memfokuskan (highlight) perkembangan terbaru dalam konteks sosial politik yang terjadi Thailand Selatan tersebut. Data-data sosial politik, sejarah dan fakta-fakta kontemporer dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman terperinci mengenai situasi terkini sekaligus kebijakan Pemerintah terhadap wilayah-wilayah Selatan Thailand.

1. Setting Politik Thailand Selatan Tahun 1785-1950

Patani sebagai Negeri melayu Islam yang terletak berhadapan dengan Negeri-negeri Melayu Ligor¹⁸, Terang, Phatlung, dan Singgora yang telah dijajah oleh Thailand. Dan lima politik pemerintah Thailand terhadap masyarakat Muslim Patani

¹⁸<http://estehej.o.blogspot.co.id/2016/06/sej-arah-pergolakan-politik-umat-islam.html>

yaitu :

- a. Politik Dominasi Polisi 1785-1902 (Rampas bumi Patani)
- b. Politik Transimigrasi 1960-1980 (Pidah Masyarakat Patani Kebangkok dan Pindah Orang Thailand Kepatani)
- c. Politik Harapan baru 1989 - 1996
- d. Politik Asimilasi 1945-1906 (Mempersiapkan Orang Melayu Patani)
- e. Politik kekerasan bersenjata 2004 - Sekarang

Patani tidak akan berhenti menerima tekanan dan pengaruh politik penjajahan Thailand ini. Sumber Thailand sendiri mengatakan bahwa Patani dan kedah berada di bawah pengaruh Thailand sejak zaman Sukhotai. Tekanan ini sebenarnya dikarenakan adanya potensi sosial ekonomi dan politik Negeri Melayu Semenanjung yang sebenarnya diharapkan oleh Thailand karena kepentingan politiknya. Ketika Thailand menghadapi kelemahan dari ancaman musuhnya yaitu Burma. Patani selalu mengambil kesempatan ini untuk mengubah pemikirannya dan membebaskan diri. Sulthan Mudzaffar Syah (1530-1564) anak Sulthan Ismail Syah yang memerintah Patani dan ia mencoba sebanyak dua kali untuk menaklukkan kota Ayuthia pada tahun 1563 tetapi ia mengalami kegagalan.

Menjelang akhir abad ke 18 Kuasa Thailand yang baru telah memberikan ancaman ketentaraan ke arah selatan. Dua Negeri Melayu kerajaan Islam yaitu Patani dan Kedah berada dalam bimbingan karena divonis menjadi naungan Thailand sejak zaman Sukhotai. Sebaliknya atas perbedaan dari segi keturunan, kepercayaan, bahasa dan kebudayaan telah menyebabkan orang-orang melayu dan kedua Negeri merasa berbeda berada di bawah pemerintahan Thailand. Kesan yang nyata hanya Thailand yang mempunyai kekuasaan politik yang cukup untuk menunjukkan penguasaan penjajahannya terhadap raja-raja Melayu Patani dan Kedah. Hal inilah yang akan mendirikan kerajaan Thailand ketika Negeri-negeri menghadapi zaman kemerusatannya.

Dengan kekalahan Patani untuk pertama kalinya dalam serangan kelima, setelah itu Negeri Patani dapat dijajah kembali

oleh Kerajaan Thailand. Fenomena ini akan diingat sepanjang masa oleh rakyat Patani yang dijajah hingga hari ini. Penahanan Patani ini telah dapat memenuhi cita-cita dan dendam politik raja-raja Negara Gajah Putih. Kekalahan menimbulkan tidak aman kepada Negeri Semenanjung. Keadaan ini membuat Sultan Abdullah Kedah mengundang Sir Francis Light sebanyak beberapa kali untuk membicarakan masalah pelarian Patani dan keselamatan Kedah. Pada 24 November 1786 M, Kedah mengirimkan utusannya yaitu, Datuk Syah Bandar ke Pulau Pinang untuk merundingkan soal pertahanan dan ancaman luar. Sebaliknya Light terus menolak karena tidak mau kompromi dalam pertikaian tersebut. Rasa tidak aman ini juga diketahui oleh Sultan Mansur Syah I (1733-1793 M) dari Terangganu yang mengutus menggunakan surat pada bulan November 1786 untuk Francis Light dalam rangka meminta bantuan keselamatan dari Inggris. Pada 24 Februari 1787 M selanjutnya, Sultan Trangganu mengantar surat tetapi kali ini surat diantarkan kepada Kapten James Glass. Beliau menawarkan peluang perdagangan kepada Syarikat Hindia Timur Inggris di Trangganu.

Adanya kekalahan yang dialami oleh Kerajaan Patani untuk pertama kalinya setelah serangan kelima dan akhirnya Patani dijajah kembali oleh kerajaan Thailand. Setelah terjadinya kekalahan untuk Kerajaan Patani lalu muncul dampak-dampak dari kekalahan itu seperti kemunduran yang terjadi pada tahun 1785 M didalam Kerajaan Islam Melayu di Patani. Hal inilah yang mengakibatkan pergolakan politik umat islam melayu patani pada tahun 1902 hingga setelah runtuhnya kerajaan Patani dan berakibat pergolakan yang lebih luas lagi di Patani.

Sejarah Pergolakan Umat Islam di Melayu Patani yang juga menyebabkan keruntuhan bagi Kerajaan Patani Pada Tahun 1785-1950 M. Pada tahun 1930-an terjadi perubahan dalam system pemerintahan Thailand. Sistem monthon tidak terjadi lagi. Monthon Pattani dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Setiap muang (negeri) dijadikan changwat (provinsi) dan dipantau langsung oleh kerajaan pusat

di Bangkok. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri, Pridi Panomyong memperkenalkan sistem baru dalam pemerintahannya. Setiap provinsi mempunyai seorang wakil di DPR, dan di wilayah selatan Thai ini wakil-wakil rakyat yang beragama Islam selalu terpilih dalam Majelis Perundangan Siam. Setelah revolusi tahun 1932, pemerintahan kerajaan Thai telah menegaskan pembentukan negara Thai moderen di bawah suatu kesatuan (unitary state). Rakyat tidak lagi berada di bawah pemerintahan monarki mutlak, tetapi konsep rakyat sebagai warga (citizenry) negara - bangsa Thailand mulai diperkenalkan. Ini berarti masyarakat Melayu di Pattani menjadi bagian dari warga Thai dan mereka juga harus menonjolkan identitas baru negara Thai.

Pada tahun 1938, Phibun Songkham, seorang Jenderal Militer Thai mengukudeta pimpinan kerajaan Thai. Antara kebijakan Phibun yang kontroversial adalah pelancaran kebijakan rathniyom (revolusi budaya) yang bertujuan menciptakan suatu identitas budaya Thai yang maju. Suatu kebijakan "mensiamkam" orang-orang bukan Thai (siamization policy) seperti orang-orang Melayu dan Cina. Kebijakan ini menjadikan masyarakat Melayu dan Cina dipaksa menukar nama asal mereka menjadi nama Thai dan berkomunikasi hanya dalam bahasa Thai. Hal yang sama juga pernah terjadi pada masa pemerintahan orde baru di Thailand. Kebijakan pemerintah yang tetap melaksanakan undang-undang Pendidikan tahun 1921, yang mengharuskan sistem pembelajaran pendidikan di sekolah rendah dalam bahasa Thai, jelas semakin memperparah konflik antara kaum Melayu dengan kerajaan Thai. Masyarakat Melayu Islam di wilayah Selatan khawatir anak-anak Melayu akan melupakan bahasa ibu mereka, jika proses belajar mengajar menggunakan bahasa Thai. Lebih jauh lagi, ancaman kemungkinan akan terjadi konversi agama dalam komunitas Melayu yang beragama Islam ke agama Buddha akibat proses pendidikan di sekolah yang menggunakan bahasa Thai.¹⁹

¹⁹ Untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang perkembangan pendidikan di wilayah selatan Thailand lihat, Uthai Dulyakasem (1981),

Revolusi budaya Phibun Songkhram sepanjang 1938-1944 M, telah menindas kumpulan minoritas Cina dan Melayu. Di wilayah Selatan Thai, hanya masyarakat Thai - Buddha yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, sedangkan kaum Melayu dan Cina yang menginginkan jabatan di pemerintahan harus mengganti nama mereka menjadi nama Thai.

Pada masa pemerintahannya, Phibun juga menghapus Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus keagamaan di daerah-daerah Melayu dan mengalihkan kaskuskasus yang berkaitan dengan keagamaan masyarakat Islam ke mahkamah-mahkamah sivil Thai.^{vii} Kebijakan ini mengakibatkan suatu implikasi yang serius dalam aspek harta warisan, upacara perkawinan dan undang-undang Syariah kaum Melayu.

Sementara itu, penaklukan Asia Tenggara oleh tentara Jepang yang dibantu oleh pemerintahan Phibun, mengakibatkan Thailand berkonfrontasi dengan Inggeris. Pemimpin-pemimpin masyarakat Melayu Pattani telah menggunakan kesempatan ini untuk mendapat simpati Inggris, dengan menunjukkan kesetiaan dan membantu tentara Inggris untuk mengalahkan tentara Jepang. Antara tokoh pejuang Melayu Pattani yang terlibat membantu Inggeris melawan Jepang antara lain adalah Tengku Mahmud Mahyiddeen yang merupakan putra Raja Terakhir kerajaan Pattani, Tengku Abdul Kadir. Beliau ikut menjadi Pasukan Tentara Sukarela Kelantan untuk menentang Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Inggris Malaya, Mahyiddeen melarikan diri ke India bersama tentara Inggris. Di India, beliau bekerja dengan Inggris untuk mengerahkan sukarelawan Melayu agar menyertai Angkatan 136 yang didirikan untuk bergerilia menentang penjajahan Jepang.^{viii} Ketika peperangan menentang Jepang hampir tuntas, Inggris melihat pentingnya membentuk suatu sistem pengawasan internasional di perbatasan SiamMalaya, mulai dari Segenting Kra (Kra Ithmus) sampai ke negeri-negeri Melayu Utara yang berada di bawah pemerintahan Thailand sewaktu Perang Dunia Kedua. Inggris juga mulai

"Education and Ethnic Nationalism: A study of the Muslim Malaya in Southern Siam", Disertasi Ph.D, Stanford University, 1981.

mempertimbangkan kedudukan Pattani di bawah Inggris Malaya secara serius untuk menghargai kesetiaan Pattani terhadap Inggris dalam perang melawan Jepang.

Mengantisipasi gerakan pro-kemerdekaan tersebut, pada Juli 1944, kerajaan Thai melalui gubernur Pattani, Janyawisat mengadakan pertemuan Majelis Pemilu Umum di Pattani untuk membahas keinginan Melayu Pattani yang ingin bergabung di bawah pemerintahan Inggris. Namun, hasil Deklarasi Persidangan Cairo 1945 yang memutuskan suatu resolusi tentang larangan penjajahan wilayah asing, maka keinginan untuk mengambil alih kawasan Selatan Thailand oleh Inggris menjadi sirna.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Malaya, telah memotivasi golongan Melayu di Pattani untuk mempertahankan negeri mereka dari pemerintahan Thai yang dianggap tidak adil. Pada bulan November 1945, masyarakat Melayu Pattani mengajukan petisi kepada Inggris untuk menyatakan rasa tidak puas hati atas tindakan kerajaan Thai yang tidak mengakui bahasa Melayu sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap identitas kaum Melayu. Petisi tersebut juga meminta Inggris untuk mengambil alih Pattani dari kerajaan Thai.²⁰

Namun petisi tersebut tidak mengubah status quo Pattani. Pihak Inggris tidak menuntut penyerahan wilayah dari Thailand kecuali pengembalian empat negeri Melayu di Utara Semenanjung Tanah Melayu. Pihak Inggris juga terpaksa akur dengan resolusi Persidangan San Fransisco yang diusulkan Amerika Serikat sebagai sekutu perang Inggris untuk mengahiri semua perang, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Ancaman campur tangan negara asing terhadap kasus Pattani telah mendesak kerajaan Thai untuk berwaspada dalam menerima suatu kesepakatan damai atas wilayah-wilayah Melayu di Selatan Thailand. Pelantikan chularatchamontri (Penasihat Urusan Agama Islam) pada tahun 1945 merupakan suatu

²⁰ FO 371/54421/F 2433, Suprema Allied Commander, Southeast Asia to J.C. SterndaleBennett (Far Eastern Dept FO London), 31 Jan 1946. Mengandung petisi oleh delapan orang pejuang Melayu Patani.

langkah yang signifikan. Chularatchamontri (Sheikhul-Islam) ini berfungsi sebagai penasihat Raja Thai dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Satu badan majlis pusat dan majlis daerah untuk urusan Islam juga didirikan disetiap daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kebijakan ini merupakan bukti nyata bahwa Islam telah diberikan suatu legitimasi untuk pertama kalinya di Thailand.

Usaha kerajaan Thai untuk mengintegrasikan Islam dan Melayu dalam rangka strukturisasi negara Thailand melalui kebijakan kerajaan adalah dengan memberikan status kewarganegaraan kepada kaum Melayu-Islam di Selatan Thai. Penggunaan istilah Thai-Islam untuk menggantikan istilah Melayu Islam bertujuan untuk menggolongkan mereka sebagai warganegara Thai. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan suatu bukti kongkrit bahwa kerajaan Thai berusaha untuk memutuskan hubungan antara masyarakat Islam Thai dengan identitas Melayu yang dikaitkan dengan negara tetangga Malaysia. Berakhirnya masa pemerintahan Phibun telah membuat semua kebijakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah Melayu ditinjau ulang oleh kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Khuang Aphaiwong yang liberal. Beliau mengirim Utusan Khusus ke wilayah-wilayah Selatan Thai untuk melaporkan penyebab munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Utusan Khusus tersebut berhasil membongkar segala tindakan diskriminatif dan penindasan yang dilakukan oleh beberapa pegawai kerajan Thai-Siam yang bertugas di daerah- daerah Melayu.

Intelijen Thai juga melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mahattai) bahwa kerajaan Melayu menyokong gerakan pembebasan yang dilakukan oleh kaum Melayu Pattani. Kerajaan Malaya dilaporkan telah mengadakan sebuah persidangan Islam yang berlangsung di Bentong, Pahang pada tahun 1967, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Satun, Yala, Narathiwat dan Pattani. Antara mereka yang termasuk dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Inspektor Polisi di Baling, Kedah.^{xii} Keraguan Thailand terhadap dukungan Inggris terhadap pihak Melayu Pattani semakin nyata setelah mereka

mengetahui Mahmud Mahyiddeen telah memimpin orang Melayu Pattani untuk menentang kerajaan Thai dari markas mereka di Kelantan.

Pada bulan April 1947, Haji Sulong seorang tokoh penting gerakan separatis Pattani mengajukan lima tuntutan kepada kerajaan Thai yaitu:²¹

- a. Hendaklah kerajaan Thailand mengadakan seorang yang memegang kekuasaan penuh memerintah atas empat wilayah yaitu Patani, Yala, Narathiwat, Setul, yang dilantik daripada orang Islam yang lahir dalam salah satu wilayah ini dengan dipilih oleh rakyat jeleta sendiri. Orang yang memegang kekuasaan ini hendaklah dikekalkan selama-lamanya dengan tidak bertukar ganti kecuali ia meninggal.
- b. Sekalian hasil bumi yang didapati dalam empat wilayah ini hendaklah dibelanjakan unntuknya stemmata-mata.
- c. Hendaklah kerajaan mengadakan pelajaran bahasa Melayu dalam Sekola- sekolah mukim yang berada di empat wilayah ini.
- d. Pegawai kerajaan dalam empat wilayah ini hendaklah 80 peratus jumlahnya daripada orang-orang Islam yang asal dari wilayah-wilayah ini.
- e. Hendaklah kerajaan menggunakan bahasa Melayu dalam pejabat kerajaan bersama-sama dengan bahasa Siam.
- f. Hendaklah kerajaan membenarkan Majlis Agama Islam mengeluarkan undang-undangnya sendiri yang berkenaan dengan adat istiadat agama Islam dengan persetujuan oleh orang yang memegang kekuasaan penuh itu.
- g. Hendaklah kerajaan mengasingkan mahkamah syariah daripada mahkamah kerajaan yang ada dalam empat wilayah itu dan berkuasa menghukom perbicaraannya dengan bebas

Permintaan Haji Sulong menuntut hak otonomi untuk memerintah daerah daerah Melayu ini, menyebabkan pihak militer Thai menangkap Haji Sulong dengan tuduhan menghasut (sedition) pada Januari 1948.

Penangkapan Haji Sulong ini telah mendorong

²¹ Clive J. Christie, *Op.cit.*, h. 183.

kemarahan di kalangan masyarakat Melayu. Tidak lama setelah penangkapan Haji Sulong, muncul artikel yang melaporkan tentang penindasan oleh Siam atas masyarakat Melayu di Selatan Thai yang ditulis oleh seorang wartawan Inggeris bernama Barbara Whittingham Jones dan diberitakan secara meluas diberbagai media massa.^{xv}

Artikel tersebut telah mengakibatkan kemarahan kerajaan Siam dan Bangkok mulai mengambil tindakan agresif terhadap pemimpin-pemimpin Melayu sebagai usaha untuk membendung kegiatan kumpulan-kumpulan separatis di Selatan Thai. Orang Melayu yang dianggap terlibat dalam gerakan ini melarikan diri ke Malaya untuk menghindari penangkapan dan penindasan tentara Siam di wilayah-wilayah Selatan Thailand.

Era setelah Perang Dunia Kedua, penentangan serta aktivitas-aktivitas kumpulan separatis mulai semakin berkembang. Salah satu kumpulan tersebut adalah Gabungan Melayu Pattani Raya (GEMPAR), sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1948, dengan tujuan menyatukan kaum Melayu di Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun untuk menuntut kemerdekaan dari Siam.

2. Setting Politik di Thailand Selatan tahun 1950-1980an

Perkembangan situasi politik di Tanah Melayu pada era 1950-an sangat berbeda dengan era 1930-1940-an. Pada tahun 1930-1940-an, orang Melayu dan Inggris di tanah Melayu menunjukkan rasa simpati dan prihatin atas perjuangan kaum Melayu Pattani. Namun pada akhir tahun 1940-an memasuki awal tahun 1950-an, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan ancaman pihak komunis telah berhasil mengalihkan perhatian masyarakat Malaya untuk menitikberatkan persoalan internal mereka. Oleh sebab itulah dukungan masyarakat Tanah Melayu terhadap masalah Pattani mulai bekurang. Disamping itu, pihak Britis yang takut terhadap gerakan komunis, mulai bekerjasama dengan kerajaan Thailand untuk menumpas organisasi berhaluan kiri ini. Akibatnya, menjelang bulan November 1948, organisasi GEMPAR dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Inggris.

Jalinan kerjasama antara kerajaan Thailand dengan

Inggris Malaya untuk menentang komunis telah mengubah kebijakan British Malay terhadap wilayah Melayu Pattani. Serangan-serangan komunis di daerah Kelantan dari perbatasan Thailand di Narathiwat, Yala dan Songkhla mulai mencemaskan kerajaan Inggris akan kemungkinan terjadi penyerangan komunis terhadap bagian utara Malaya.^{xvii} Akhirnya, pada tahun 1949, disepakatilah kerjasama untuk mewujudkan program keamanan bersama di perbatasan antara dua kerajaan itu.^{xviii} Efektifitas MoU ini membuat pemerintah Inggris di Malaya mulai mengancam segala aktivitas pro-Pattani di Kelantan.

Bekas anggota Partai Komunis Malaya (PKM) yang melarikan diri ke dalam hutan di bagian pedalaman Selatan Thailand mulai menghasut masyarakat disekitar perbatasan untuk melancarkan serangan ke Malaya. Hal ini telah menyebabkan wilayah-wilayah perbatasan Selatan Thailand kembali menjadi wilayah konflik. PKM dituduh mengerahkan kaum Melayu Islam di perbatasan menjadi geriliawan. Keadaan ini mengkhawatirkan kedua kerajaan dan mereka sadar bahwa mereka harus bekerjasama untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Pada tahun 1965, kegiatan separatis semakin memuncak dengan berdirinya Barisan Nasional Pembebasan Republik Pattani (National Liberation Front of the Pattani Republic (NLF) yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam.^{xix} Sebuah Unit Militer Asing sebagai bagian dari NLF yang disebut dengan Tentara Nasional Pembebasan Rakyat Pattani (Pattani People's National Liberation Army) juga dideklarasikan. Di samping itu, masuknya pengaruh dan elemen eksternal sepanjang tahun 1970-an telah membawa implikasi besar terhadap skenario politik internal di wilayah Islam Thailand. Golongan Pemuda yang mendapat pendidikan dari universitas dan institutusi perguruan tinggi di Timur Tengah, Pakistan dan Malaya telah memperkenalkan ide-ide pembaharuan dunia Islam dan ini secara tidak langsung mempengaruhi gerakan perjuangan Pattani ketika itu.²²

²² Lihat, Astri Suhrke (1975), "Irredentism Contained; The Thai-Muslim Case" *Comparative Politics* 7(2), h. 199.

Periode ini merupakan masa ketegangan politik antara Malaya dengan Thailand. Malaysia menuduh Thailand memberikan perlindungan kepada bekas anggota PKM dan tidak menunjukkan komitmen untuk memberantas kegiatan geriliawan ini. Sebaliknya, Thailand menuduh dukungan yang diberikan oleh partai politik seperti Partai Islam Se-Malaysia (PAS) terhadap gerakan separatis di Thailand dan bantuan secara kontiniu yang diterima oleh kumpulan-kumpulan tersebut dari negara-negara Islam telah mengancam keamanan internal negara tersebut. Namun, Thailand mengakui bahwa masalah di perperbatasan selatan itu hanya bisa diatasi melalui kerjasama dengan Malaysia. Perkembangan gerakan fundamentalis agama dan militansi Islam, terutama di negeri-negeri utara Tanah Melayu menghalang kerajaan Malaysia untuk campur tangan dalam isu provinsi- provinsi di Selatan Thailand, kerana takut akan dampak politik domestik yang serius. Mengingat kondisi ini merupakan suatu krisis politik yang sensitif, maka Kuala Lumpur tidak mau campur tangan dalam isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan Thai, dengan alasan hal itu merupakan masalah internal Thailand.²³

Menjelang tahun 1980-an, muncul tiga kumpulan separatis yang beroperasi di kawasan perbatasan di Selatan Thailand, yaitu gerakan separatis Islam, Komunis berbangsa Cina yang merupakan bekas anggota Malayan Peoples Liberation Army (MPLA) dan komunis Thai (phu ko kan rai). Dari ketiga kumpulan tersebut, kumpulan seperatis Islam adalah kelompok yang kurang mengancam keselamatan di bagian Selatan. Tindakan angkatan tentara Thai untuk membanteras golongan militan berhasil menundukkan hampir semua anggota NLF menjelang tahun 1982. Kebanyakan pemimpin NLF melarikan diri dari Thailand dan mengungsi di negara asing.xxii Pada tahun 1980-an, Bangkok telah mengambil keputusan untuk membujuk masyarakat Islam di Selatan Thailand dengan program-program pembangunan

²³ Hans H. Indorf, *Impediments to Regionalism In Southeast Asia: Bilateral Constraints Among ASEAN Member States*, Singapore: ISEAS, 1984, h. 38-42

ekonomi sebagai usaha untuk mencegah kemungkinan bergabung dengan golongan separatis Melayu Islam dan MPLA.

3. Setting Politik Thailand Selatan tahun 1990-an

Perkembangan era 1990-an merupakan masa penguatan hubungan dan keamanan antara Bangkok dan wilayah-wilayah Selatan Thailand. Kebijakan-kebijakan kerajaan Demokrat Thai yang memegang tampuk pemerintahan mencoba pendekatan baru dengan program pengintegrasian (inclusion), setelah sekian lama mengadopsi sistem exclusion. Peranan orang Melayu dalam politik kebangsaan Thai dalam tahun 1990-an mulai membaik. Terbukti pada periode ini, banyak tokoh-tokoh Islam yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan Thai, seperti Surin Pitsuwan pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Thailand dan setelah itu menjadi Menteri Luar Negeri, Wan Muhammad Nor Mata menjadi Ketua Perhimpunan Kebangsaan Thailand dan Den Tohmeena, anak Haji Sulong pernah menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.^{xxiii} Usaha demokratisasi yang agresif sejak akhir tahun 1980-an hingga tahun 1990-an berhasil menciptakan kestabilan politik di Thailand. Peran orang Melayu yang semakin meningkat termasuk dalam proses perumusan perlembagaan terbaru Thai pada tahun 1997 membuktikan usahausaha kerajaan Thai untuk melibatkan orang Melayu dalam proses politik negara.

4. Perkembangan Politik Thailand Selatan tahun Terakhir

Krisis ekonomi 1997, membuat Thailand dalam suasana ekonomi dan politik yang tidak stabil. Ini diikuti dengan insiden WTC, 11 September 2001 yang membawa dampak serius dalam krisis politik global dan keamanan serantau.

Masalah semakin panas ketika masyarakat dan kerajaan Thailand dikejutkan oleh isu keamanan negara ketika terjadi perampokan lebih 300 pucuk senjata di kompleks tentara Cho Ai Rong Narathiwat.^{xxiv} Insiden ini mengorbankan empat anggota Pasukan Keamanan Thailand. Kejadian ini menyebabkan wilayah Selatan dalam keadaan siaga satu dan hal

ini juga mendapat perhatian khusus dari Bangkok, negara-negara tetangga dan dunia internasional. Keadaan semakin genting dengan terjadinya peristiwa penembakan di Masjid Krisek (Krue Se)^{xxv} pada bulan April 2004 yang mengorbankan 107 orang. Seterusnya, pada 25 Oktober 2004, peristiwa Tak Bai.²⁴ yang menelan korban lebih 100 orang Melayu-Thai dari wilayah Selatan.

Ketiga peristiwa ini membuktikan bahwa kajadian tersebut memaparkan polapola persamaan dengan sejarah politik Pattani pada awal abad ke-20. Insiden- insiden tersebut juga mencerminkan manifestasi perasaan ketidakpuasan rakyat Selatan Thailand terhadap pemerintahan Bangkok. Tindakan Bangkok menggunakan kekerasan untuk mengamankan keadaan membawa implikasi negatif sehingga wilayah-wilayah tersebut terus menjadi medan konflik.

Setelah Januari 2004, kembali terjadi serangan terhadap orang sivil yang beragama Islam, Buddha dan anggota Pasukan Keamanan (PK) Thailand yang telah menjadikan krisis di wilayah Selatan sebagai krisis nasional. Untuk menangani insiden dan keganasan ini, Bangkok memberlakukan undang-undang tentara (Martial Law). Kebijakan ini mendapat sorotan dari dalam dan luar negara, karena undang-undang tentara memberikan kekuasaan yang mutlak kepada tentara.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Keamanan Thailand adalah memeriksa rumah penduduk, mesjid dan pondok pesantren, kerana tempat-tempat ini mereka anggap sebagai tempat tinggal atau tempat persembunyian anggota yang terlibat dengan kumpulan separatis. Banyak pemuda dan ulama Melayu ditangkap setelah undang-undang tentara diterapkan.

Di samping itu, jumlah korban rakyat sivil dan anggota Pasukan Keamanan terus meningkat ketika undang-undang tentara dijalankan. Sepanjang Januari sampai April 2004 saja, 94 orang terbunuh dan 95 orang lagi cedera. Agensi internasional seperti OIC juga telah mempersoalkan transparansi tindakan

²⁴ Nazarudin Yahya (2004), *Kemelut Politik Wilayah Selatan Thailand 2004: Suatu Analisa*, h. 42.

kerajaan Thailand dalam menangani masalah konflik bersenjata di wilayah Selatan Thailand.²⁵

Narathiwat merupakan tempat yang paling sering terjadi kontak bersenjata, yaitu sebanyak 297 kali, wilayah Pattani dan Yala, masing-masing dengan 188 dan 76 insiden serangan. Songkhla yang terdiri dari mayoritas orang Thai yang beragama Buddha (90 %) dibandingkan wilayah-wilayah Narathiwat, Pattani dan Yala.

Sedangkan insiden kematian dan cedera tertinggi terjadi di wilayah Narathiwat dan Pattani yang masing-masing mempunyai persentase penduduk Islam yang tinggi, yaitu 83 % (Narathiwat) dan 84 % (Patani) dibandingkan wilayah Yala dan Songkhla dengan persentase penduduk 57 % (Yala) dan 10 % (Songkhla).

Keadaan yang semakin kacau ini, dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak puas terhadap pemerintah. Serangan ini mungkin dilakukan oleh penduduk setempat yang marah terhadap tindakan pihak berkuasa terutama organisasi kriminal atau pengedar ganja selain anggota gerakan separatis. Ia mungkin strategi untuk menakutkan pasukan keamanan Thailand yang beroperasi di wilayah Selatan.

Walaupun pada dasarnya, serangan terhadap PK dan warga sivil kelihatan secara random, namun serangan terhadap orang sivil yang berada di lokasi terpencil, supaya tidak disaksikan oleh orang lain juga menunjukkan satu trend yang menunjukkan bahawa serangan tersebut adalah serangan yang sudah direncanakan. Berdasarkan kasus keganasan yang terjadi di wilayah-wilayah selatan Thailand antara tahun 2001 dan 2004. Pada tahun 2004 menunjukkan jumlah kasus keganasan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah kasus meningkat hampir tujuh kali lipat dari tahun 2000 sampai 2003. Kedua strategi serangan dilakukan secara random dan terencana ini menyebabkan jumlah kasus keganasan di wilayahwilayah selatan Thailand meningkat secara mendadak

²⁵ Omar Farouk Bajunid, " Islam, Nationalism and The Thai State", dlam. Wattana Sugunnasil (ed). *Dynamic Diversity in Southern Thailand*, Chiang Mai; Silkworm Books, 2005, h.

pada tahun 2004.

Selain separatist Islam, sebenarnya banyak pihak yang terlibat dalam kasus keganasan di Selatan Thailand. Karena itu keganasan di Selatan Thailand sering disebut oleh sejarawan Thai sebagai "keganasan khao yam" (Keganasan Nasi Kerabu). Khao yam, adalah sejenis makanan di wilayah Selatan Thai yang biasanya dihidangkan pada waktu pagi yang dibuat dari berbagai macam ramuan. Seperti khao yam yang mengandung berbagai bahan makanan, kemelut politik di Selatan Thai juga mempunyai dilakoni oleh banyak aktor.

Antaranya, kumpulan gedebe (nak kleng) yang merupakan anggota kumpulan yang terlibat dalam pembunuhan dan berbagai kegiatan penyelundupan, penjualan senjata dan ganja. Mereka juga menjadi pembunuh bayaran untuk chao pho (orang besar) yang merupakan ketua kelompok kriminal yang beroperasi seperti kumpulan mafia. Beberapa orang tokoh politik Thailand diduga menjadi chao pho dan terlibat dalam merusak kestabilan politik dan keamanan negara demi menjaga kepentingan perniagaan mereka.

Pasukan keamanan Thailand yang terdiri dari Militer Thailand (Royal Thai Army) dan Polisi Thailand (Royal Thai Police), juga dituduh terlibat dalam konflik ini. Namun, diantara semua aktor yang dinyatakan di atas, kumpulan gerakan separatistlah sering dituduh bertanggung jawab atas keganasan di Selatan Thailand. Kalau dicermati secara kritis, pada hakikatnya kebanyakan dari kumpulan pejuang separatist yang giat beroperasi pada tahun-tahun 1960-1980-an tidak lagi aktif. Sebagian pecah menjadi beberapa buah kumpulan kecil, dan perpecahan ini menjadikan organisasi-organisasi tersebut semakin lemah dan tidak efektif dalam memperjuangkan tujuan organisasi mereka. Antara kumpulan-kumpulan separatist tersebut adalah Barisan Revolusi Nasional (BRN), Gerakan Mujahideen Islam Pattani (GMIP), Pattani United Liberation Organisation (PULO) dan New PULO serta barisan kemerdekaan Pattani (Pattani United Front for the Independence of Pattani).

Kebijakan Pemerintah Thailand terhadap Minoritas Muslim Patani

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Muslim Patani

Secara kultural, bagi dari segi agama, bahasa dan budaya, minoritas Muslim Muangthai yang tinggal di Thailand Selatan merupakan bagian dari bangsa melayu, yang secara geografis berbatasan dengan negara-negara Melayu Malaysia. Namun dalam segi politik, mereka merupakan bagian dari bangsa Muangthai.

Sebenarnya, Muslim Thailand lebih memilih memisahkan diri dari kerajaan Muangthai atau bergabung dengan Malaysia, meskipun berada dibawah pemerintahan Inggris, karena mereka dapat hidup bersama dengan masyarakat yang seagama, sebahasa, dan sebudaya. Dibawah pemerintahan Muangthai yang menganut agama Budha sebagai agama resmi negara, mereka merasa diperlakukan tidak adil sebagai minoritas. Disamping itu mereka terisolasi dan birokrasi negara, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan. Sehingga asimilasi dan integrasi yang diharapkan pemerintah menjadi sulit tercapai. Kaum Muslim Thailand sebaliknya terkesan cenderung mengisolasi diri, hal itu karena mengalami kesulitan beradaptasi. Pertama, karena kebanyakan mereka (terutama yang tinggal di daerah *rural* seperti Pattani, Yala, Naratiwat) hanya dapat berbicara sedikit bahasa Thai atau tidak bisa sama sekali. Ini membuat mereka tidak mampu berkomunikasi dengan kaum Cina dan Thai Budha. *Kedua*, berdasarkan keyakinan agama, kaum Muslim Thailand secara militan menolak perilaku sosial yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Mislanya mereka tidak diperbolehkan menghadiri perayaan agama lain atau menikah dengan penganut agama lain. *Ketiga*, ketakutan Muslim Thailand bahwa interaksi dengan Thai Budhis akan mengakibatkan anak-anak mereka menerima budaya Thai, melalui proses asimilasi dan berakibat mengikis tradisi Melayu serta nilai-nilai ajaran agama Islam.

Selain itu, proses isolasi terhadap kaum Muslim Thai, sebagian disebabkan oleh *self imposed*, sebagian juga disebabkan oleh tekanan orientasi komunikasi media. melayani pemirsa

native speaking Thai. Siaran banyak menggunakan bahasa Thai dan memfokuskan diri pada soal-soal yang menjadi kepentingan populus Thai Budhist dan Cina. Sangat sedikit program dan waktu siaran dalam bahasa Melayu. Siaran Radio Bangkok yang juga jelas diterima di propvinsi-provinsi tersebut, hanya menggunakan bahasa Thai, dan tidak menggunakan bahasa Melayu sama sekali. Lebih dari itu surat kabar juga dicetak dalam huruf dan bahasa Thai, kecuali koran lokal, ada kolom yang menggunakan bahasa Melayu. Kebanyakan Muslim Thai justru mendengarkan siaran atau membaca koran yang datang dari negara tetangga dekatnya Malaysia. Oleh karena itu, bahasa Melayu mereka justru bertambah bagus, selain Inggris. Secara umum, kaum Muslimin dibagian Selatan Thailand tetap merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan pengaturan administrasi di wilayah mereka.

Perasaan terasing dan ketidakpuasan itu semakin kuat ketika kaum bangsawan Pattani dicopot dari semua kekuasaannya, dan semua jabatan yang dulu mereka pegang dialihkan ke birokrat Bangkok atau dari provinsi-provinsi utara, yang memiliki bahasa, agama, dan budaya yang berbeda dari masyarakat Pattani.

Karena itu, yang menjadi persoalan bagi minoritas Muslim adalah bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam proses politik sebuah negara yang didasarkan atas kosmologi Budhist, birokrasi yang mewakili negara didominasi oleh orang Thai-Budhis dari segi bentuk dan isinya, yang paling penting adalah bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk mengubah nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan untuk disesuaikan dengan kebutuhan negara.

Pada masa pemerintahan Pemerintahan Perdana Menteri Phibul Songkhram (1938-1944) dan (1947-1957) , misalnya dikeluarkan kebijakan dan program integrasi pemerintahan Muangthai yang sangat mengkhawatirkan rakyat Muslim Patani. Sebagai seorang diktator, Phibul Songkhram berusaha men-Siamkan semua kelompok minoritas non-Budhis di Muangthai. Pada tahun 1940 mulai diberlakukan dan dipaksakan aturan-

aturan kultural tertentu, seperti memakai pakaian bergaya Barat, mengadopsi nama-nama Thai bila ingin memasuki sekolah-sekolah pemerintah atau jika ingin melamar pekerjaan di jajaran pemerintahan. Bahasa Melayu dilarang diajarkan di sekolah-sekolah negeri atau digunakan dalam percakapan dengan para pejabat pemerintah.

Kebijakan Phibul diatas, didukung oleh sistem politik yang berlaku di Muangthai, dimana otoritas penguas bersifat absolut, tidak dapat diganggu gugat. Penguasa cenderung menggunakan berbagai cara untuk menjamin kesesuaian dengan kelompok minorias dan mengontrol setiap *contervailing power*. Sistem seperti ini berlaku dalam sistem pemerintahan Muangthai yang dikenal dengan "politik birokrasi" yang berarti kuatnya kontrol pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Kebijakan yang dipaksakan ini justru mempertegas identitas mereka untuk menentang.

Pada periode selanjutnya, pemerintah Thai mencabut beberapa kebijakan ekstrem khususnya maklumat Ratthanayom dari rezim lama dan menunjukkan sikap politik terhadap kaum Muslimin, seperti memberikan kebebasan kepada minoritas Muslim untuk menjalankan agamanya. Cara ini berhasil membuat masyarakat Muslim mau terbuka dan mau menggandeng sesama Muslim untuk berperan dalam pembangunan nasional Muangthai. Berpartisipasi Muslim Melayu dalam sistem politik dan sebagai warga negara Muangthai mulai tumbuh sejak bangkitnya demokrasi pada tahun 1979.

Kaum muslim di Muangthai terpecah menjadi empat kelompok, yaitu *Chularajmontri* (kepala kantor masyarakat muslim di Muangthai), kelompok ortodok yang menerbitkan *Al-Rabith*, dan kelompok Muslim Melayu di selatan yang menentang kelompok *Chularajmontri*, namun menolak dikatakan sebagai rival *Al-jibaddan AL-Rabith*. Semua kelompok ini meskipun terpecah karena perbedaan kepentingan, namun sama-sama memiliki komitmen terhadap Islam.

Minoritas Muslim Thailand merasa tidak senang dengan intervensi pemerintah yang sangat dalam terhadap kehidupan

keagamaan dan sosial budaya mereka. Disamping itu, kaum Muslim Muangthai banyak yang beranggapan bahwa kewarganegaraan mereka tidak mungkin diselaraskan dengan ketaatan terhadap Islam. Hal ini memperteguh gerakan-gerakan separatis Muslim yang gigih melakukan perang gerilya melawan kekuatan-kekuatan pemerintah Muangthai. Kaum separatis ini menginginkan kemerdekaan meskipun sebagian lebih menyukai suatu perserikatan dengan Malaysia. Namun kenyataannya, wilayah mereka secara internasional diakui sebagai bagian dari wilayah nasional Thailand. Kecil kemungkinan bagi kaum separatis ini untuk dapat benar-benar memisahkan wilayah Muslim Patani dari Muangthai. Tujuan pertama gerakan minoritas Muslim ini adalah membebaskan Melayu Muslim Patani dari kekuasaan Muangthai dan bersatu dengan Malaysia. Tetapi tujuan ini sulit untuk dicapai. Kemudian tujuan perjuangan mereka diubah, yaitu untuk mendapatkan otonomi dibidang politik dan kebudayaan dengan harapan dapat menegakkan Islam di kalangan Melayu Muslim Patani.

Penentangan serius terjadi pada tahun 1947 ketika Haji Sulong, seorang pemimpin Muslim dan Presiden Dewan Agama Islam, bersama dengan beberapa pemimpin Muslim lainnya menandatangani petisi menuntut otonomi penuh, penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi disamping bahasa Thai, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Sekolah Dasar wilayah tersebut, penerapan Hukum Islam bagi kaum Muslim, merekrut kaum Muslim di provinsi-provinsi yang dikuasai Muslim dengan komposisi 80%, dan membentuk Dewan Muslim yang khusus mengurus persoalan-persoalan spesifik kaum Muslim. Petisi ini ditolak pemerintah, dan Haji Sulong ditangkap tahun 1948. Satu tahun kemudian, dia dipenjarakan selama 7 tahun, namun dibebaskan setelah mendekam selama tiga setengah tahun. Pada tahun yang sama, pemerintah berusaha menarik kembali perhatian masyarakat Muslim dengan menjadikan hari Jum'at sebagai hari libur sekolah, membantu pembangunan mesjid-mesjid, memberlakukan hukum Islam, memperkenalkan bahasa dan budaya Melayu sebagai mata pelajaran di Sekolah Menengah.

Pada saat yang sama juga mengalir kewajiban bagi setiap siswa untuk mempelajari etika Budha di sekolah pada wilayah tersebut, dan mengangkat seorang pejabat Muslim untuk membantu pemerintah melayani persoalan-persoalan Islam. Namun, kebijakan itu tidak pernah dipelihara dan tidak konsisten.

Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, baik pemisahan diri dari kerajaan Thai maupun otonomi penuh, kelompok minoritas Muslim Thailand bergabung dengan kelompok organisasi seperti *Pattani United Liberation Organization* (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), Barisa Revolusi Nasional dan masih ada lagi organisasi lainnya. Keinginan untuk memisahkan diri dari kerajaan Thai dikarenakan kaum Muslim melihat adanya keengganan pemerintah untuk memberikan kebebasan dalam mengamalkan ajaran agamanya dan mengungkapkan aspirasi budaya mereka. Hal ini dimaknai kaum Muslim sebagai penjauhan mereka dari agamanya dan pelumpuhan budaya umat Islam. Selain itu tindakan birokrat lokal yang tidak simpatik seringkali menimbulkan banyak kesulitan.

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Kotemporer Muslim Patani.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara pihak kerajaan Thai dengan masyarakat Melayu Muslim tampak membaik. Putera mahkota kerajaan sering berkunjung ke provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu. Pembangunan jalan dan gedung-gedung sekolah menandai adanya perhatian serius dari pihak kerajaan. Sejak tahun 1990-an mereka mulai mendapat kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. Namun, keinginan untuk memberlakukan hukum Islam di wilayah itu masih diperjuangkan.

Hubungan pemerintah Melayu Muslim yang mulai membaik ini tak dapat dipisahkan dari demokrasi yang semakin membaik di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Thailand. Seperti dikemukakan Abdul Rozak, seorang tokoh Patani, bahwa perubahan sikap pemerintah Thailand itu

lebih karena tekanan internasional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, meski pemerintah mencoba memperbaiki hubungannya dengan Melayu Muslim mereka masih belum bisa menghilangkan trauma masa lalunya, terutama kalangan generasi tua. "kami masih ingat beberapa tahun yang lalu untuk memakai kopiah dan sarung saja tidak diperbolehkan. Dan sehari-hari kami diharuskan menggunakan bahasa Thai". Ujar seorang bapak di Naratiwat mengenang masa lalu yang pahit. Kuatnya kesadaran akan masa lalu yang pahit, membuat Melayu Muslim ini tetap menjaga jarak dengan pemerintah Thailand. Hal ini antara lain terindikasi dari cara mereka yang menjaga kemandirian finansial lembaga pendidikan tradisional pesantren. Dengan menolak menerima bantuan pemerintah mereka bisa terbebas dari sikap pemerintah untuk mendikte mereka.

Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat konflik ini adalah pertarungan antara Muslim Melayu dan Budhis Thai. Kata 'Muslim' dan 'Budhis' mengarahkan pada kuatnya pengaruh agama dalam masing-masing masyarakat. Apabila dilihat lebih dekat, identitas Muslim Melayu di Selatan memang sangat kuat. Masyarakat yang khususnya di tiga provinsi : Pattani, Yala, dan Naratiwat memiliki identitas keIslaman dan keMelayuan yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat lebih menerima dengan orang Melayu daripada etnis lain, terutama Thai. Penggunaan bahas Melayu menurut statistik nasional Thailand juga sangat kuat di tiga provinsi ini diatas 70% dibandingkan dengan provinsi lain di Selatan : Satun dan Songkhla. Tetapi bahasa Melayu tidak diperbolehkan sebagai bahasa resmi diperkantoran, lembaga pendidikan pemerintah, dan tempat atau acara resmi lainnya. Larangan ini tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Melayu, karena bahasa ini memberi spirit identitas mereka yang berbeda dengan mayoritas warga Thailand, yang berbahasa Thai dan Buddha.

Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 200 orang meninggal berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan. Korban lebih banyak ditembak dan dibom oleh kelompok yang

tidak dikenal, juga oleh pendekatan militer dan polisi terhadap Muslim. Pada tahun 2004, 30 pemuda Muslim ditembak oleh tentara di Masjid Kru Se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan pada abad 15, masjid tertua di Thailand. Satu periode dengan masa kejayaan Islam pada khalifah Abbasiyah. Peristiwa kedua adalah pada oktober 2004, sekitar 175 Muslim Takbai meninggal diperjalanan, setelah mereka demonstrasi kepada pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan dibelakang. Dua peristiwa sangat membekas dihati Muslim, dan banyak pemuda dan masyarakat Muslim semakin meningkatkan penyerangan terhadap berbagai organ pemerintah maupun masyarakat Budha. Reaksi Muslim Selatan ini di respon negarif oleh pemerintah, dengan tetap memberlakukan darurat militer di kelima provinsi ini.

Peristiwa Takbai yang menewaskan Muslim sekitar 200 orang menimbulkan reaksi paling keras dari milisi Muslim, yang kemudian membalas dengan penembakan dan pembomam yang misterius yang menargetkan korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thai, etnis Cina dan pendeta Budha. Hampir setiap bulan sejak peristiwa 2004, terjadi korban di pihak tentara atau Budha. Kerusuhan ini sempat menjadi perhatian Amerika Serikat yang menawarkan bantuan keamanan untuk mengatasi 'gerilyawan' dari Selatan.

Pada Februari 2004, Organisasi Konferensi Islam (OKI) minta pemerintah Thailand untuk mengakhiri tindak kekerasan terhadap warga Muslim di wilayah Selatan Thailand. Seruan ini menjadi salah satu point dalam pernyataan hasil pertemuan di Jeddah antara Sekretaris Jendral OKI Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu dan perdana menteri Malaysia Abdullah Badawi, yang mengetuai Konferensi Tingkat Tinggi Islam ke-10.

Prof. Ihsanoglu mengungkapkan rasa ketidakpuasannya, karena tindak kekerasan terhadap warga Muslim di Thailand masih terus terjadi meskipun OKI dan dunia Internasional sudah mendesak pemerintah Thailand untuk segera mengakhirinya. Sekjen OKI itu kembali mengingatkan Thailand pentingnya menegakkan keadilan dan investigasi atas kasus-

kasus kekerasan terhadap warga Muslim. Ihsanoglu juga menekankan agar pemerintah Thailand tidak bersikap diskriminasi dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial diwilayah Selatan Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, dengan terbentuknya komisi rekonsiliasi nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di Selatan. Kuatnya peran tentara di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa di jalankan. Pendidikan, pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak leluasa dinikmati bagi Muslim Melayu. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme pro kebijakan pusat menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi. Kehadiran masyarakat internasional, antara lain : Nahdhatul Ulama yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintah Thailand akan banyak membuahkan hasil jika pemerintah pusat mengakomodasi gagasan dan harapan Muslim Melayu di Selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka, dan pengakuan pemerintah pusat atas tradisi ini, khususnya di Patani, Yala, Naratiwat.

Sementara itu, Partai Demokrat yang menekankan persatuan kuat negara Thailand tidak berbuat banyak dalam perdamaian di Selatan, khususnya mendukung kepentingan Muslim. Kritik ini tentu penting diperhatikan oleh pihak politisi, yang memainkan isu Selatan untuk kepentingan mereka. Partai Thai Rak Thai yang dalam periode Thaksin memenangi parlemen secara sengaja meninggalkan Selatan dalam proses pembangunan dan modernisasi Thailand secara umum. Bahkan membiarkan kerusuhan di Selatan. Sejak tahun 2004, kekerasan di Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah menewaskan 2.200 orang. Kerusuhan yang muncul dipelihara oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Diantara mereka adalah aparat pemerintah.

Penutup

Perkembangan Politik pemerintahan Thailand terhadap warga Muslim Patani Pada tahun 2001-an terjadi perubahan dalam system kebijakan politik Positif pemerintahan Thailand terhadap masyarakat muslim khususnya di Patani Thailand Selatan²⁶.

- a. Setiap masjid mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut mencakupi gaji bulanan bagi imam, khotib, bilal dan anggota ahli jawatan kuasa masjid.
- b. Setiap sekolah Tadika mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut mencakupi gaji bulanan bagi guru-guru Tadika dan yang bersangkutan dengan sekolah Tadika itu.
- c. Program menaikan Haji bagi warga Patani Setiap tahun pemerintah memberikan kouta untuk masyarakat Patani dapat menunaikan Haji secara gratis. Segala biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, tidak semua mendapatkan kouta tersebut. Adapun yang akan mendapat kesempatan itu hanya orang yang sesuai dengan mekanisme atau syarat- syarat yang ditentukan seperti orang miskin.
- d. Member benih binatang dan tanaman Salah satu program pemerintah untuk masyarakat dapat berdikari secara mandiri adalah dengan membagikan benih atau bibit binatang dan bibit tanaman. Di antaranya bibit bebek, kambing, sapi. Sementara bibit tanaman, di antaranya bibit kangkung, bibit kelapa, sawit dan sebagainya.
- e. Bank Islam ,dalam kemudahan bagi masyarakat muslim Patani.
- f. Anggaran projek bangunan, dalam kemudahan bagi masyarakat muslim Patani sepertinya dalam membangun toilet dan perpustakaan desa dan lain- lain lagi.
- g. Ganti rugi dalam bukti tidak kesalahan, seperti masyarakat tertembok oleh tentera Thailand dan anak gadis diperkosa,dan meniyayai masyarakat muslim Patani dan sebagainya.

Pada tahun 1930-an terjadi perubahan dalam Sistem

²⁶ Wawancara Mahasiswa S2 UNY Yogyakarta Maroso Dolah

monthon tidak terjadi lagi. Monthon Pattani dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Setiap muang (negeri) dijadikan changwat (provinsi) dan dipantau langsung oleh kerajaan pusat di Bangkok. Setelah revolusi tahun 1932, pemerintahan kerajaan Thai telah menegaskan pembentukan negara Thai moderen di bawah suatu kesatuan (unitary state). Revolusi budaya Phibun Songkhram sepanjang 1938-1944 M, telah menindas kumpulan minoritas Cina dan Melayu. Di wilayah Selatan Thai, hanya masyarakat Thai - Buddha yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, sedangkan kaum Melayu dan Cina yang menginginkan jabatan di pemerintahan harus mengganti nama mereka menjadi nama Thai.

Perkembangan situasi politik di Tanah Melayu pada era 1950-an sangat berbeda dengan era 1930-1940-an. Pada tahun 1930-1940-an, orang Melayu dan Inggris di tanah Melayu menunjukkan rasa simpati dan prihatin atas perjuangan kaum Melayu Pattani. Namun pada akhir tahun 1940-an memasuki awal tahun 1950-an, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan ancaman pihak komunis telah berhasil mengalihkan perhatian masyarakat Malaya untuk menitikberatkan persoalan internal mereka. Jalinan kerjasama antara kerajaan Thailand dengan Inggris Malaya untuk menentang komunis telah mengubah kebijakan British Malay terhadap wilayah Melayu Pattani. Menjelang tahun 1980-an, muncul tiga kumpulan separatis yang beroperasi di kawasan perbatasan di Selatan Thailand.

Perkembangan era 1990-an merupakan masa pengukuhan hubungan dan keamanan antara Bangkok dan wilayah-wilayah Selatan Thailand. Kebijakan-kebijakan kerajaan Demokrat Thai yang memegang tampuk pemerintahan mencoba pendekatan baru dengan program pengintegrasian (inclusion), setelah sekian lama mengadopsi sistem exclusion. Peranan orang Melayu dalam politik kebangsaan Thai dalam tahun 1990-an mulai membaik. Terbukti pada periode ini, banyak tokoh-tokoh Islam yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan Thai.

Pertama, karena kebanyakan mereka (terutama yang

tinggal di daerah *rural* seperti Pattani, Yala, Naratiwat) hanya dapat berbicara sedikit bahasa Thai atau tidak bisa sama sekali. Ini membuat mereka tidak mampu berkomunikasi dengan kaum Cina dan Thai Budha. *Kedua*, berdasarkan keyakinan agama, kaum Muslim Thailand secara militan menolak perilaku sosial yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Mislanya mereka tidak diperbolehkan menghadiri perayaan agama lain atau menikah dengan penganut agama lain. *Ketiga*, ketakutan Muslim Thailand bahwa interaksi dengan Thai Budhis akan mengakibatkan anak-anak mereka menerima budaya Thai, melalui proses asimilasi dan berakibat mengikis tradisi Melayu serta nilai-nilai ajaran agama Islam.

Daftar Pustaka

- Aek Tangsupvattana, Ora-orn Poocharoen, *Problem of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendation*, (Bangkok: Chulalongkon University, 2009),.
- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad Fathy, *Pengantar Sejarah Patani*, (Alor Star: Pustaka Darussalam, 1994).
- Ahmad Hasan Zaiyat, *Tarikh Adab Arabi*, (Lebanon: Dar Al-Ma'arif, 2001).
- Ahmad Omar Capakiya, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam Selatan Thailand 1909-2002*, (Kuala Lumpur: UKM, 2002).
- Anthony Giddens (Ed.), *Positivism and Sociology*, (London: Heinemann, 1975).
- Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*.
- A. Suryana Sudrajat, *Cahaya Nusantara, Patani Negeri Selalu Resah*, No. 8, 26-04-2007.
- Astir Syokri, *The Muslims: Some Aspects of Minority Integration*, *Pacific Affair*, Vol. xliii, No. 4, 1970-1971.
- Betty R. Soharf, *Kajian Sosiologi Agama*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

- Bun Krom Dongbangsathan, *The Last War*, t.t., hlm. 5. Lihat juga. Samai Carunchang, *Yon Roi Muslim Siam*, (Bangkok: Mulnithi Phua Pathana Yauwacun Su Saphawa Phunam, 2012).
- Carunchang, *Yon Roi Muslim Siam*, (Bangkok: Mulnithi Phua Pathana Yauwacun Su Saphawa Phunam, 2012).
- Dahlan Tarnin, *Kaidah-Kaidah Hukum Istam* (Kuttiyah Al-Khamsah), cet.ke- 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).
- Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, *Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar Vanve).
- F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, cet. 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Farid Mat Zim, *Minority Muslim di Thailand*, (Selangor: Minda Bandar Baru Bangi, 1998).
- Hans H. Indorf, *Impediments to Regionalism In Southeast Asia: Bilateral Constraints Among ASEAN Member States*, Singapore: ISEAS, 1984.
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Herry Nurdi, *Perjuangan Muslim Patani Sejarah Panjang Penindasan dan Cita-cita Perdamaian di Patani Darussalam*, (Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise SDN BHD, 2010).
- Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Kelantan: Majlis Agama Islam Kelantan, 1985).
- Ismael Che Daud, *Tokoh-tokoh Ulama SemenanjungMelayu*, (Kuala Lumpur: Perniagaan Rampai Utama, 1988).
- Kementerian Kebudayaan Nasional, *Karn Serm Sarng Watthanatham Prachatiptai Nai Sangkum Thai*, (Bangkok: Kementerian Kebudayaan Nasional, 2009).
- Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan kekuasaan Khalifah (Menyikap Dinamika dan Sejarah politik Kaum Sunni)*, cet. Ke-2, (Yogyakart: Safiria Insania Press, 2005).
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistimologi, Metoclogi, dan Etika)*, edisiked:ua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Lihat, Astri Suhrke (1975), "Irredentism Contained; The Thai-

- Muslim Case" *Comparative Politics* 7(2).
- L. Laeyendecker, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, (Orde, Verandering, Ogelijkheid: Een Inleiding in De Geschiedenis van De Sociologie), alih bahasa Sumekto, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- M.Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2003.
- Malise Ruthven, Azim Nanji, *Historical Atlas of Islam*, (Massachu Setts: Harvard University Press Cambridge, 2004).
- Mohd.Zambari A. Malek, *Umat Islam Patani*.
- Mohd. Zamberi A. Malek. *Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen*.
- Mujahirin Thohir, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, (Semarang: Fasindo Press, 2006).
- Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun*, (Jakarta: Para Madina, 1995).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),
- Nazarudin Yahya (2004), *Kemelut Politik Wilayah Selatan Thailand 2004: Suatu Analisa*.
- Omar Farouk Bajunid, " Islam, Nationalism and The Thai State", dlam. Wattana Sugunnasil (ed). *Dynamic Diversity in Southern Thailand, Chiang Mai; Silkworm Books, 2005*.
- Sheppard Mubin, *Taman Indera: Malay Decorative Arts and Passtimes*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972).
- SOBT, Phean Patthana Ha Changwad Chaidea Phaktai, Yala: 1996.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan r&d*, (Bandung: Alfabeta,cv).
- Sudirman Tebba (Ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan*

- Pengkodifikasiannya, (Bandung: Mizan Pustaka, 1993).
- Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai.
- Taufik Abdullah, Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, (Bangkok: Thammasat University, 2003).
- <http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>
- <http://estehejo.blogspot.co.id/2016/06/sejarah-pergolakan-politik-umat-islam.html>
- <http://syamina.org/syamina36-PATANI-BUKAN-PATTANI-PERJUANGAN-PANJANG-MUSLIM-MELAYU-DI-THAILAND-SELATAN.html>
- <http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>.